



integrito

MENJAGA KEDAULATAN ALAM



Anti-corruption Learning Center

Corruption Eradication Commission of Indonesia

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pusat Edukasi Antikorupsi
(Anti-corruption Learning Center)
Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
Indonesia**

Tel.: +62 21 2550 8300
e-mail: informasi@kpk.go.id
Web.: <http://www.aclc.kpk.go.id>



FOTO COVER
Menjaga Kedaulatan Alam
Photo : integrito/KPK



UTAMA 12
MENJAGA KEDAULATAN ALAM

8

JEJAK KASUS

RAMAI-RAMAI MENGGASAK
MEGA PROYEK E-KTP

26

PERINTIS

"DEMIT" YANG MELEK
TEKNOLOGI

30

TATAP MUKA

Bayu Gawtama
RELAWAN ITU PERLU RUANG

40

KIAT

WASPADAI KPK PALSU

42

CAKRAWALA

NASIB PARA PENGUNGKAP
FAKTA

46

KHUSUS

BERBAGI PERAN TINGKATKAN
LITERASI

56

KANAL

MELATIH BUAH HATI BERSIKAP
JUJUR

59

MOZAIK

RENDAH HATI DI ATAS
LUMPUR

64

PARENTING

PERAN AYAH MENGUATKAN
KEPRIBADIAN ANAK

66

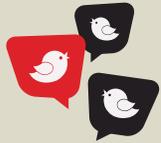
AKU KPK

BALADA SEBUAH ROMPI

74

TELADAN

KH Abdur Rozak Fachruddin
MENGABDI TAK KENAL
AMPLOP



@Tjokagung
Maju terus KPK

@misgianto43
SDM UNGGUL INDONESIA MAJU dengan semangat yang tinggi memajukan negara adalah tugas seluruh anak bangsa, melalui KPK Indonesia semoga menjadi Negara yang anti korupsi

@dickyrs13
Hanya KPK lembaga yang bisa di Percaya di Negri ini.

@fandiah_18
Lembaga independen yang menurut gw bagus ya itu KPK, yang kedua Komnas HAM. Semoga aja Komnas HAM bisa seperti KPK.

@Umielizabeth
Semangat semangat semangat KPK

@freddycun97
Org yg korupsi itu tdk manusiawi tdk punya hati, mending uang nya buat org yg membutuhkan sesuap nasi ato org susah, hajar trus pak sampai ke ujung akar korupsi

@liahusinmidwife
KPK harus selalu menegakkan kebenaran dan hrs lebih besar agar negara ini tak melulu dirampok dan yg terpenting nih pak jabatan tertentu agar dipega

integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Yuyuk Andriati Iskak; **Redaktur Pelaksana:** Lufti Avianto; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Siti Sharatassiyah. **Kontributor:** Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout & Grafis:** Guruh Suliano Putra, Iman Santoso; **Periset Data:** Sicilia Julianty Hutabarat; **Fotografer:** Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassiyah; **Sirkulasi:** Sicilia Julianty Hutabarat, Sheto Risky Prabowo. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** integrito@KPK.go.id; **Website:** www.KPK.go.id; **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK_RI; **Instagram:** @official.KPK; **Youtube:** KPK RI

MERDEKA DARI PELEMAHAN

Sejarah mencatat, bangsa ini telah berjuang membe-rantas korupsi sejak 1959 melalui lembaga antikorupsi per-tama, yakni BAPEKAN. Kemudian berganti-ganti, ada Operasi Budhi (1963), Komando Retooling Aparatur Revolusi (1964), Tim Pemberantas Korupsi (1967), Komisi Empat (1970), Komisi Antikorupsi (KAK, 1970), Opstib (1997), TGPT-PK (2000) hingga lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 Tahun 2002.

Upaya membentuk badan khusus antikorupsi dengan kewenangan khusus itu, kerap menghadapi serangan dengan cara dilemahkan dengan membentuk badan baru; dibubarkan; tidak diberikan peran hingga menghilang ditelan zaman; dan dilemahkan dengan pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga tersebut.

Kini, upaya pelemahan pemberantasan korupsi masih terus terjadi dengan wacana berbeda: mengu-atkan KPK melalui revisi UU KPK, yang sejatinya melemahkan.

Dari draf yang diajukan DPR pada Rapat Paripurna awal Sep-tember lalu, ada 10 poin yang akan melemahkan KPK. Di antaranya independensi KPK terancam, penyadapan yang dibatasi, pemben-tukan dewan pengawas, sumber penyidik dan penyidik dibatasi, ke-

wenangan mengambil alih perkara dipangkas, KPK berwenang meng-hentikan penyidikan dan penun-tutan, kewenangan pengelolaan LHKPN dipangkas, serta kewenangan strategis lainnya pada pro-ses penuntutan, dipangkas.

Kini, sudah 74 tahun Indone-sia merdeka dan sudah 60 tahun berjuang memberantas korupsi melalui badan khusus. Namun, per-lawanan menghadapi pelemahan lembaga antikorupsi, sejatinya tak pernah berhenti. Sampai hari ini. Hingga detik ini. ¹



Dukungan Mahasiswa - Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menginap di depan Gedung Merah Putih KPK sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga antikorupsi itu, Selasa (12/9)



Pemakaman KPK - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan malam renungan bertajuk “Pemakaman KPK” untuk menyikapi pelemahan KPK sesuai DPR mengesahkan revisi UU KPK. Selasa (17/9).



RAMAI-RAMAI MENGGASAK MEGA PROYEK E-KTP

SEJUMLAH NAMA TERLIBAT DALAM MEGA PROYEK E-KTP. TOTAL RP2,3 TRILIUN DARI RP5,9 TRILIUN YANG DIANGGARKAN BERHASIL DIKERUK. SEBANYAK 8 TERSANGKA YANG TERDIRI DARI ANGGOTA DPR, PEJABAT KEMENDAGRI DAN SWASTA KINI TELAH DIVONIS. BAGAIMANA KELANJUTAN TERSANGKA LAINNYA?

“TOTAL
KERUGIAN
NEGARA 2,3T”

ANANG SUGIANA
EKS DIRUT PT QUADRA
SOLUTION
Vonis: Pidana penjara
6 tahun dan denda Rp
1M subsider 4 bulan
kurungan

IRMAN
Dirjen Kemendagri
Uang diterima: USD 500 ribu
Vonis: Pidana penjara 15 tahun dan
denda 500jt subsider 8 bulan penjara

SUGIHARTO
PNS Kemendagri
Uang diterima: USD 50 ribu
Vonis: Pidana penjara 15 tahun
dan denda 500jt subsider 8 bulan
penjara

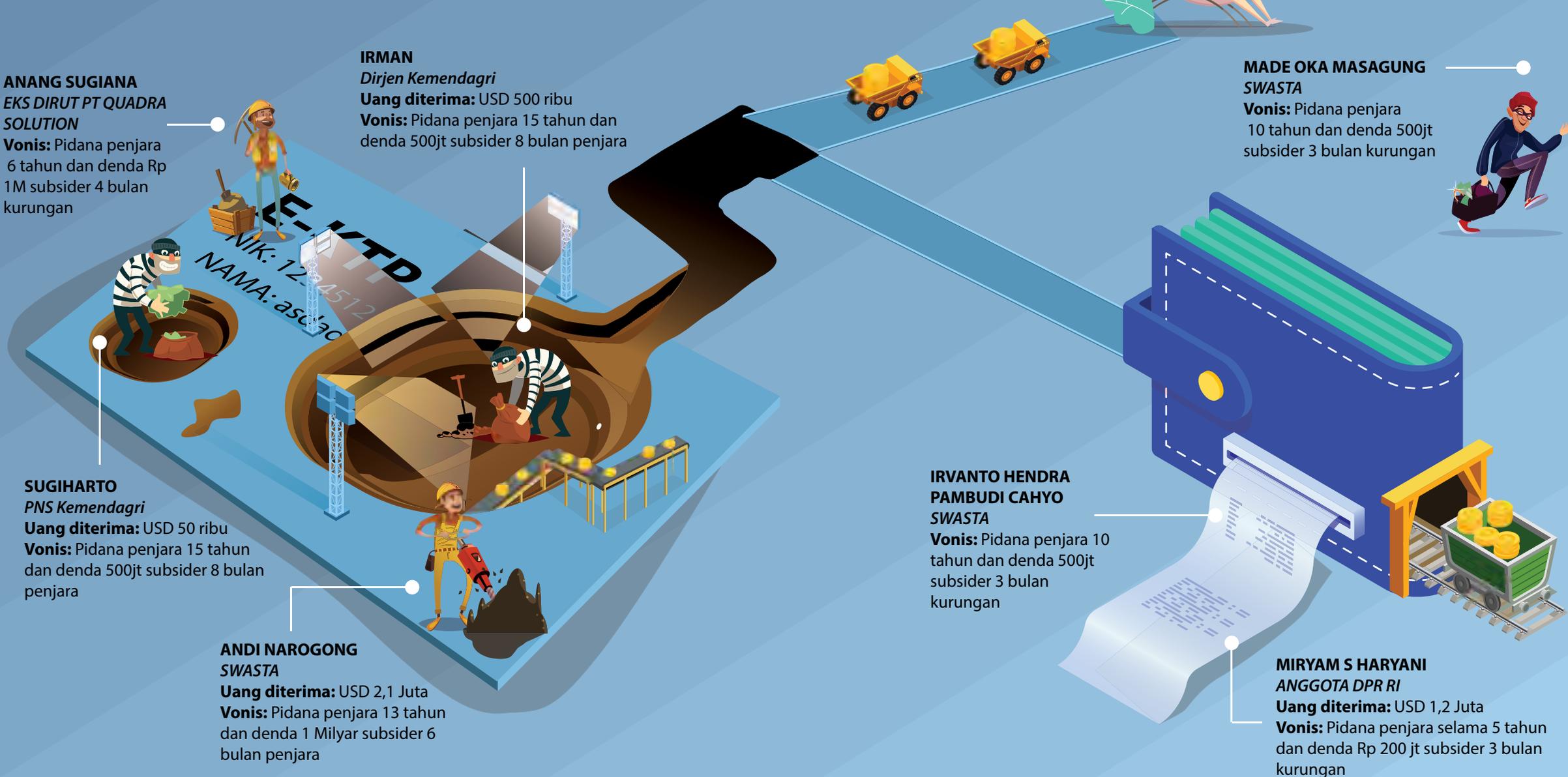
ANDI NAROGONG
SWASTA
Uang diterima: USD 2,1 Juta
Vonis: Pidana penjara 13 tahun
dan denda 1 Milyar subsider 6
bulan penjara

SETYA NOVANTO
KETUA DPR RI
Vonis: pidana penjara 15 tahun dan
denda Rp 500jt subsider 3 bulan
kurungan, pidana tambahan
mencabut hak terdakwa untuk
menduduki dalam jabatan publik
selama 5 tahun terhitung sejak
terpidana selesai menjalani masa
pidana

MADE OKA MASAGUNG
SWASTA
Vonis: Pidana penjara
10 tahun dan denda 500jt
subsider 3 bulan kurungan

**IRVANTO HENDRA
PAMBUDI CAHYO**
SWASTA
Vonis: Pidana penjara 10
tahun dan denda 500jt
subsider 3 bulan
kurungan

MIRYAM S HARYANI
ANGGOTA DPR RI
Uang diterima: USD 1,2 Juta
Vonis: Pidana penjara selama 5 tahun
dan denda Rp 200 jt subsider 3 bulan
kurungan



MENYEBAR NILAI ANTIKORUPSI DI PENJURU NEGERI

KALI KEDUA, BUS ANTIKORUPSI KEMBALI MENJELAJAH. MENJANGKAU LEBIH JAUH, AGAR LEBIH BANYAK MASYARAKAT YANG TAHU BAHWA KORUPSI ITU MUSUH BERSAMA.

Hari itu, Jumat 26 Juli 2019 menjadi hari yang paling ditunggu Ni Made Lilik. Sebagai seorang calon anggota legislatif terpilih, ia merasa membutuhkan banyak bekal untuk memasuki dunia politik yang ia akan jalani. Sebab, ia mengaku tak memiliki latar belakang hukum dan politik.

“Aku *excited* banget mau tahu apa yang disampaikan KPK, karena aku baru (terpilih),” kata Lilik yang juga pengusaha salon kecantikan ini, sebelum kegiatan Pembekalan Sosialisasi Antikorupsi untuk Caleg DPRD Terpilih dan Ketua DPD Parpol di Kab. Buleleng.

Lilik beranggapan, dunia poli-



Bus Jelajah Negeri – Bus Jelajah Negeri Antikorupsi saat tiba di Buleleng Bali.

tik yang baru dijejaki itu sangat dekat dengan korupsi. Sebab, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30

Juni 2019 menunjukkan, ada 255 koruptor yang merupakan anggota DPR dan DPRD. Inilah yang sempat membuatnya khawatir. Meski begitu, tak membuatnya surut untuk mewakili dan memperjuangkan suara kaum perempuan di DPRD Kab. Buleleng.

Hari itu, ia mendapat pelajaran berharga dari Penasihat KPK Tsani Ananari. Di sela pemaparannya, Tsani menunjukan *headline* beberapa media daring mengenai 22 anggota DPRD Kota Malang yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi berjamaah. Berita itu membuat bulu kuduk Lilik berdiri. Di saat yang sama, ia juga terkesan dan muncul semangat baru tentang pentingnya integritas.

Ia akan selalu mengingat pesan Tsani yang disampaikan siang itu, “Semoga kekuasaan membawa kita pada kemuliaan, bukan kecenderungan kecurangan,” ujarnya menirukan Tsani.

Lilik merasa beruntung karena ia bisa mempelajari batasan yang boleh dan tidak boleh ia lakukan sebagai anggota legislatif. Ia juga belajar cara mencegah korupsi, yaitu dengan integritas, akuntabilitas dan transparansi, serta pengetahuan pendukung lainnya mengenai kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), aturan gratifikasi, dan *whistle blower system*. Ia berharap KPK bisa

menyelenggarakan kegiatan serupa agar bisa belajar lebih banyak lagi.

Kegiatan yang diikuti Lilik, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan *Roadshow* Bus KPK 2019 “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Kabupaten Buleleng, Bali pada 26-28 Juli 2019 lalu. Selain singgah di Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, bus ini juga menyinggahi Universitas Pendidikan Ganesha dan Taman Kota Singaraja untuk memberi inspirasi kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, guru, hingga organisasi, dan komunitas.

Di kampus Universitas Pendi-

“Ini pelajaran penting bagi kami. Penyampaian tadi juga sangat menginspirasi,” ujar Teguh yang bercita-cita menjadi jaksa.

Lilik dan Kadek hanyalah dua dari ribuan orang yang merasakan manfaat sosialisasi yang diselenggarakan KPK melalui bus antikorupsi. Konsep penyebaran nilai antikorupsi melalui bus merupakan pertama kalinya di dunia. Dengan bus ini, KPK menjelajahi berbagai kota untuk bertemu masyarakat guna menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dengan berbagai medium seperti film, musik, dongeng, per-



dikan Ganesha, salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Kadek Teguh Werdi antusias dengan kehadiran KPK. Ia sangat tertarik dan mengaku banyak mengikuti isu korupsi lewat media.

“Korupsi itu sudah memunculkan kegelisahan. Meskipun saya masih mahasiswa, saya kesal melihat korupsi di Indonesia,” ujar Teguh.

Pada kegiatan “Kuliah Umum dan Pemutaran Film Antikorupsi” itu, ia mengaku mendapat pencerahan dari film “Melawan Diam” tentang pentingnya keberanian melawan korupsi bagi generasi muda, yang diputar sebelum sesi diskusi.

mainan, *boardgames*, hingga ranah diskusi.

Ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan *roadshow* bus KPK. Sebelumnya, bus ini telah berkeliling ke 11 kota/kabupaten dan berhasil menyebarkan virus antikorupsi ke lebih dari 19 ribu orang. Tahun ini, bus antikorupsi akan mengunjungi 28 kota/kabupaten, diawali dengan Kabupaten Ngawi pada 25 Juni 2019 dan berakhir di Kabupaten Karang Anyar pada 2 Oktober 2019. Tiap singgah, anak-anak di kota itu akan menitipkan hasil karya lukisan mereka bus antikorupsi untuk dipamerkan di kota selanjutnya sebagai pesan berantai. 



UTAMA

MENJAGA KEDAULATAN ALAM

Dua tikus tengah asyik menggerogoti pepohonan yang hijau dan rindang di sebuah hutan. Mereka seolah tak peduli dengan dampak yang akan timbul di kemudian hari akibat perbuatannya. Seperti banjir dan tanah longsor, atau pemanasan global akibat hutan yang gundul. Yang penting bagi mereka hanya urusan perut sendiri terpenuhi. Lainnya, tak peduli.

Sementara itu, dua ekor cicak menyergap dan hendak meringkus dua tikus tadi. Dua rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK” hendak dipasangkan kepada dua tikus itu. Namun, seekor buaya justru mengadang dua cicak untuk membela tikus-tikus itu.

Inilah aksi teatrikal yang dipertontonkan di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Juli lalu. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Bersihkan Indonesia, yang merupakan para pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan Auriga Nusantara.

Mereka membawa pesan untuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK agar menaruh perhatian yang besar pada korupsi di sektor ini. Sebab, “Sumber daya alam dan energi adalah sektor strategis nasional yang rentan oleh praktik korupsi. Peran KPK dalam memerangi korupsi sektor tersebut telah dibuktikan dengan pengungkapan sejumlah kasus besar, serta upaya membenahan tata kelola berbagai sektor SDA,” kata Edo Rakman, koordinator aksi.

Aksi teatrikal itu memberi pesan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga tanda kerusakan lingkungan yang kian nyata. Dua cicak diasosiasikan sebagai KPK, yang berjuang membasmi koruptor, yang



digambarkan sebagai tikus. Nah, buaya digambarkan sebagai sosok kekuatan besar yang melindungi koruptor-koruptor itu.

Korupsi di sektor sumber daya alam itu khas, bukan korupsi di hilir saja, melainkan diorganisir oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga mampu mempengaruhi kebijakan negara. Tentu saja, kebijakan itu telah ‘dibisiki’ kepentingan tertentu sehingga akan memberi keuntungan bagi koruptor dan kawannya, serta berdampak pada kerugian negara.

Karena berdampak sangat besar, itu sebab KPK menaruh perhatian yang juga besar melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNP-SDA) yang sudah berjalan lebih dari lima tahun.

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif, pemberantasan korupsi dan penyelamatan SDA dipandang menjadi salah satu isu prioritas, mengingat sumber daya alam kita yang terbatas dan kerusakannya dapat mengancam kehidupan manusia. Menurutnya, selama ini, hanya sedikit yang negara dapatkan dari sektor SDA, sedangkan

nilai kerusakan yang dihasilkan jauh lebih besar.

“Manusia itu butuh alam untuk hidup. Jangan berharap oksigen kita tercukupi kalau hutan terus-terusan dirusak,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam Diskusi Media Evaluasi GNP-SDA di Gedung Merah Putih KPK (9/7).

Gerakan ini telah mendorong Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh 12 Kementerian/Lembaga pada 11 Maret 2013. Melalui NKB ini, KPK terus berupaya menguatkan koordinasi antarkementerian/lembaga dan menyelaraskan regulasi di bidang SDA-LH.

Kemudian kerja kolaborasi antarkementerian/lembaga ini di lanjutkan di tahun 2014 dengan Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Minerba di 12 Provinsi. Gagasan dari Korsup Pertambangan Minerba ini adalah untuk menyinergikan kerja antara pemangku kepentingan. Semangat kerja sama dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola di sektor SDA ini semakin

meluas ketika di tahun 2015 ditandatangani NKB tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam oleh 27 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi di Istana Negara dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu juga ditandatangani Deklarasi Penyelamatan SDA oleh Ketua KPK, Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua Kejaksaan Agung.

Semangat dari GNP-SDA, kata Syarif, merupakan upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan SDA di Indonesia. “Ini bukan urusan KPK atau kementerian-lembaga saja tapi juga seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat harus ikut andil,” katanya. Sehingga penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam yang baik, bersih dari korupsi mampu mewujudkan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat Indonesia./

Sepanjang lima tahun terakhir, GNP-SDA memfokuskan pada perbaikan tata kelola sumber daya alam, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan dan perikanan. Dari hasil koordinasi dan supervisi yang dilakukan, KPK telah



berhasil mendorong Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2017 sebesar Rp1.480 triliun atau 10,89 persen dari total PDB Indonesia. Komposisi kontribusi dari empat sektor itu, yakni kehutanan (6,19%), pertambangan minerba (43,13%), perkebunan/sawit (23,62%), dan perikanan (27,07%). Di tahun yang sama, dari empat sektor itu telah menyerap lebih dari 37 juta tenaga kerja, dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp99,91 triliun.

Bagai dua sisi mata uang. Pengelolaan SDA, selain memberikan manfaat secara ekonomi, juga berdampak negatif akibat tata kelola yang belum berkeadilan. Menurut salah satu anggota Tim Pakar GNP-SDA Prof. Hariadi Kartodihardjo, dampak negatif itu antara lain banjir dan longsor, pencemaran sungai, kekeringan, konflik lahan hingga kemtipangan pemanfaatan SDA yang masih tinggi.

“Untuk usaha kehutanan, penguasaan usaha besar seluas 40 juta hektar lebih, sedangkan masyarakat hanya mengusahakan seluas 1,7 juta hektar,” katanya.

Hariadi melanjutkan, di balik itu semua, pengelolaan SDA masih meny-

isakan satu persoalan serius lainnya, yaitu praktik korupsi yang mampu menggerus penerimaan negara maupun kekayaan negara.

Dari kajian KPK pada 2013 misalnya, terang Hariadi, perizinan di sektor kehutanan menyingkap uang perasuap antara Rp688 juta hingga Rp22,6 miliar per perusahaan per tahun. Ada pula kerugian negara akibat pembalakan liar yang ditaksir sekitar Rp35 triliun per tahun, serta produksi kayu bulat yang tidak tercatat dengan nilai kerugian antara Rp5,24 triliun hingga Rp,24 triliun (KPK, 2015).

Di sektor pertambangan minerba, kata Hariadi, GNP-SDA juga menemukan tunggakan pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun (KPK, 2020), serta potensi hilangnya penerimaan negara sebesar Rp28,5 triliun akibat persoalan administratif, buruknya sistem perizinan serta lemahnya kontrol penerimaan negara (KPK, 2013).

Selain itu, “Hingga tahun 2017, KPK juga menemukan tunggakan dari PNBP mencapai 25,5 triliun rupiah.”

Sedangkan di sektor kelautan dan perikanan, dari potensi PDB sekitar Rp70 triliun, tidak sebanding dengan

PNBP sebesar Rp230 miliar per tahun. Hal ini disebabkan praktik pengcilan ukuran GT kapal. Persoalan yang mirip, juga terjadi di sektor perkebunan sawit, dari potensi pajak sebesar Rp40 triliun, pemerintah hanya mampu memungut sebesar Rp21,87 triliun. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik WP orang pribadi maupun WP badan.

Dengan sejumlah persoalan itu, Prof. Hariadi menjelaskan, GNP-SDA melakukan sejumlah upaya, baik secara taktis, strategis dan sistematis guna meningkatkan tata kelola yang bersih. Pada level taktis, GNP-SDA memfokuskan pada upaya koordinasi, rekonsiliasi dan validasi melalui ketersediaan data dan peta yang valid.

Pada level strategis, GNP-SDA telah memantau kepatuhan para pelaku usaha, audit kepatuhan atas aspek keadilan ruang, perbaikan sistem dan regulasi, serta koordinasi dan supervisi persoalan lintas instansi.

Sementara pada level sistematis, Prof. Hariadi menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan, antara lain integrasi perizinan, perbaikan sistem penerimaan negara, perbaikan data dan informasi berbasis spasial, koordinasi

dan sinkronisasi sistem pengawasan.

“Termasuk upaya sinkronisasi regulasi yang terkait,” katanya.

Salah satu dampak positif GNP-SDA mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui pajak. Faktanya, kepatuhan WP di sektor SDA masih rendah, yakni sebesar Rp43,34 triliun atau 4,41% dari total penerimaan pajak pada 2014.

Melalui kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah dan Ditjen Pajak, KPK berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Selama rentang 2014-2017 terjadi peningkatan 32,18%.

“Peningkatan terjadi di sektor kelautan dan perikanan, yakni 56,47 persen,” kata Prof. Hariadi.

Selain pajak, GNP-SDA juga mendorong optimalisasi PNBP. Sejak 2015, sejumlah aksi telah dilakukan dan telah berhasil meningkatkan kinerja penerimaannya. Pada 2015, PNBP dari sektor minerba dan perikanan naik dari Rp21,9 triliun menjadi Rp28,35 triliun; PNBP perikanan naik dari Rp79,2 miliar menjadi Rp491 miliar; PNBP minerba naik dari Rp17,68 triliun menjadi Rp24,76 triliun; pendapatan dari iuran produksi/royalti naik dari Rp16,73 triliun menjadi Rp23,24 triliun. ●

DUA PEKERJAAN DALAM SATU HELAAN

SEJUMLAH PERSOALAN HUTAN
DIBUATKAN SOLUSI. AGAR
NEGARA TAK RUGI DAN HUTAN
TETAP LESTARI. MESKI BEGITU
KEKUASAAN KONGLOMERAT TERUS
MENGGEROGOTI.



Hasil Pembalakan Liar – Masih terjadi upaya pembalakan liar di hutan Papua.

Hutan sebagai kekayaan alam Indonesia merupakan ke-satuan utuh dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di dalam hutan yang berfungsi sebagai ruang publik dan penyangga kehidupan misalnya, budaya dan peradaban lahir menjadi cara pandang bangsa tentang bagaimana rahmat sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara adil. Adil bagi sesama, maupun untuk masa yang akan datang. Visi bangsa inilah yang dituangkan dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Dalam cita-cita itu, hutan seharusnya dipandang sebagai kekayaan negara terbesar.

Kondisi saat ini, menjelaskan bahwa praktik penguasaan hutan yang ada justru melupakan bagaimana hutan seharusnya menjadi bagian dan membentuk sistem hidup bangsa Indonesia. Ketimpangan pengelolaan dan watak kebijakan sumber daya alam yang otoriter, kelemahan dalam tata kelola, dan ketidakpastian hukum berkelindan de-

ngan salah satu musuh bangsa terbesar abad ini, yaitu korupsi.

Berbagai permasalahan yang terjadi dan terpapar saat ini seolah memberikan hipotesis bahwa Pasal 33 UUD 1945 ini telah dikorupsi. Penguasaan ratusan juta hektar kawasan hutan, belum sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat.

"Dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, cuma satu persen yang diberikan untuk skala kecil dan masyarakat adat," ujar Direktur Litbang KPK Wawam Wardiana.

Sementara itu kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dari tahun ke tahun. Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung oleh 80 juta masyarakat yang hidup dan bergantung hidupnya dari hutan.

Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian negara hingga 35 triliun rupiah per tahun akibat pembalakan liar. Kajian KPK ta-

hun 2010 mengenai perencanaan kehutanan, mengonfirmasi persoalan dalam tata laksana pengawasan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan. Analisis KPK menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadinya potensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. Ini karena (hanya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja) ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai.

Resiprokal dengan buruknya tata kelola tersebut, korupsi menjadi penyakit yang tumbuh subur di dalamnya. Dalam kajian perizinan KPK tahun 2013, membuktikan ulang bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam sangat rentan dengan korupsi. Dengan metode *Corruption Impact Assessment* (CIA) terhadap 21 regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan kayu dan

penggunaan kawasan hutan, 18 regulasi di antaranya rentan korupsi. Akibatnya, setiap bisnis proses perizinan tersebut penuh dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan *state capture*.

Kajian sistem PNBP kehutanan tahun 2015 menemukan bahwa 77 – 81 % laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya negara harus menanggung potensi kerugian negara dari PNBP PSDH-DR sekitar 5,24 – 7,24 triliun rupiah per tahun selama periode kajian (2003 – 2014). Sementara itu potensi kerugian negara dari nilai kayu komersial yang tidak tercatat sebesar 12,1 – 16,8 triliun per tahun.

Berbagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola SDA dilakukan KPK (baca: Nota Sintesis Evaluasi GNPSDA): perbaikan sistem dan regulasi, monitoring kepatuhan pelaku usaha, koordinasi dan supervisi permasalahan lintas kementerian, lembaga, dan daerah, serta *Breakthrough* dan *debottlenecking* permasalahan lintas institusi.

Namun sesungguhnya apa yang terjadi?

Upaya pencegahan korupsi disektor SDA tadi seolah membuktikan bahwa persoalan korupsi di sektor SDA bukan persoalan tata kelola semata. Akar masalah korupsi SDA adalah *state capture corruption*. Kejadian saat ini secara gamblang mengonfirmasi betapa negara melalui narasi-narasi kebijakan telah dibajak oleh kelompok kepentingan. Revisi UU Pertanahan, UU Minerba, Sumber Daya Air, Sistem Budidaya Pertanian, termasuk UU KPK adalah faktanya.

KPK menilai bahwa melindungi dan menyelamatkan hutan sebagai ruang hidup seluruh bangsa, memberantas korupsi, dan mengembalikan hak dan martabat masyarakat harus dilakukan dalam satu helaan napas. 📌

AGAR SAWIT TAK HANYA DINIKMATI ELITE

NILAI EKSPOR SAWIT INDONESIA MENYUMBANG ANGKA BESAR DI SEKTOR USAHA. MESTINYA RAKYAT SEJAHTERA. NAMUN, TEMUAN GNP-SDA BERKATA LAIN. PENERIMAAN PAJAK SAWIT SUNGGUH SANGAT SEDIKIT.



Lahan Sawit – Peninjauan langsung Tim Litbang KPK ke lahan sawit di wilayah Kalimantan Barat.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana mengatakan posisi Indonesia dalam produksi minyak sawit berada pada peringkat pertama di dunia. Ia menjelaskan lebih lanjut, menurut data Kajian KPK tentang Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit 2016, total produksi minyak sawit Indonesia mencapai 32 juta ton pada 2016. Angka ini menunjukkan Indonesia menguasai sekitar 52,5% produksi minyak sawit dunia.

“Nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia tahun 2015 pun menyumbang kontribusi lumayan besar, mencapai USD18,1 miliar, atau sekitar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia,” ungkapnya. Data kajian Litbang KPK dikuatkan oleh data BPK yang dipaparkan belum lama ini. BPK menyebut, PDB rata-rata perkebunan selama 2015-2017 meningkat rata-rata 7,35 persen, melampaui minyak dan gas (migas).

Namun, di balik pengembangan komoditas kelapa sawit, sektor perkebunan kelapa sawit nyatanya sangat rawan terhadap kasus korupsi. Soal suap

pemberian izin perkebunan kelapa sawit seringkali menyeret kepala daerah dalam pusaran permainan kotor di sektor perizinan, seperti mantan Bupati Buol Amran Batalipu.

Hal itu terungkap dalam Nota Sintesis Evaluasi GNP-SDA yang dikeluarkan KPK pada Juli 2019. KPK menemukan fakta bahwa ketimpangan pengelolaan sumber daya alam masih sangat tinggi. Sebanyak 2,5 juta hektare perkebunan sawit dikuasai oleh 10 perusahaan besar, antara lain Wilmar, Musim Mas, Asian Agri/Aprical, Salim Ivomas, Permata Hijau, Golden Hope, Felda, Astra Agro dan lainnya. Sedangkan 2,1 juta rakyat Indonesia hanya menguasai lahan seluas 4,7 juta hektare.

KPK pun menemukan sekitar Rp18,13 triliun potensi pajak tidak terpungut oleh pemerintah. Di sektor sawit saja potensi pajaknya cukup besar yaitu Rp40 triliun tetapi yang mampu dipungut hanya Rp21,87 triliun.

Rendahnya kemampuan otoritas pajak memungut pajak sektor sawit disebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang hanya 6,3 persen dan WP korporasi masih di angka 46,3 persen.

Wawan mengatakan, sengkaret penguasaan lahan dan berbagai bentuk pelanggaran terkait perpajakan sebenarnya bukan lah temuan baru. Ia mengatakan banyak sekali kasus yang telah menjadi contoh dan diproses KPK yang semuanya pun sudah terungkap ke publik. KPK juga menyakini ada potensi penggelapan penerimaan negara yang dilakukan oleh perusahaan CPO dengan modus adanya ketidaksesuaian antara HGU dengan produksinya.

Hal ini dikemukakan oleh peneliti Litbang KPK Sulistyanto, “Mereka bisa bilang HGU-nya 20 ribu, tapi dia menanam di sekitarnya, jadilah 30 ribu, belum sawit rakyat. Kan yang dikenakan pajak hanya HGU-nya saja,” terangnya.

Tim evaluasi GNP-SDA juga menyoroiti sistem pengelolaan dana oleh BPDPKS. Temuannya adalah kewenangan yang diberikan kepada komite pengarah yang terdiri dari delapan menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri PPN/Bappenas untuk menyusun alokasi penggu-

naan dana tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Disebutkan bahwa dasar pengelolaan dana PNPB dari Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah UU Perkebunan, memuat secara tegas bahwa penggunaan dana perkebunan hanya untuk penelitian dan pengembangan, peremajaan tanaman, pengembangan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana, dan promosi perkebunan. Namun demikian, komite pengarah justru mengalokasikan dana tersebut lebih dari 64-90% untuk insentif biodiesel. Meskipun dalam aturan turunannya menyebutkan dapat digunakan untuk insentif biodiesel namun itu tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Perkebunan.

Wiko Saputra peneliti Auriga Nusantara mengatakan, “Praktiknya dana ini disedot untuk subsidi biodiesel, jadi 98% alokasi dana perkebunan itu digunakan untuk subsidi biodiesel yang penerima subsidi juga bagian dari *state capture*,” terang Wiko. ●

SALING SILANG TERBITKAN IZIN

SEKTOR TAMBANG, MINERAL DAN BATU BARA TAK PERNAH SURUT DIKERUK. TATA KELOLA WAJIB DIPERBAIKI, TERUTAMA PADA SISTEM PERIZINAN. AGAR NEGARA BISA OPTIMAL MENYEJAHTERAKAN RAKYAT.



Aktivitas Pertambangan – Truk pengangkut batu bara keluar dari kapal tongkang di daerah Bangka Belitung

Penerbitan izin merupakan lahan ‘basah’ bagi pemangku kebijakan yang tak berintegritas. Dari sanalah, korupsi bermula. Kongkalikong pejabat dan pengusaha untuk memuluskan izin.

“Terlihat seperti masalah sepele, namun GNP-SDA melihat bahwa persoalan mendasar dari tidak tertata dan ‘salah kelola’ sumber daya alam justru salah satunya dari persoalan integritas,” terang Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana.

Masih ada ego sektoral. Padahal, sektor SDA memiliki tipologi masalah yang sebagian besar harus diselesaikan secara lintas-sektoral. Kasus lintas sektoral sangat menonjol, misalnya dalam polemik perizinan tambang di Pulau Bangka Sulawesi Utara yang diberikan kepada PT. MMP, disinyalasi bertentangan dengan UU Pulau Kecil dan Pesisir, UU Kehutanan, serta UU PPLH yang melingkupi persoalan: Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan konservasi

dan hutan lindung yang luasnya mencapai lebih dari 5 juta hektare di beberapa wilayah di Indonesia; Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tengah IUP yang telah dikeluarkan terlebih dahulu; dan lain sebagainya.

Wawan menjelaskan, lemahnya koordinasi lintas sektor ini telah mengakibatkan berlarut-larutnya konflik lahan dan tata ruang, timbulnya konflik baru, serta muncul dan langgengnya celah renten pada rantai perizinan. Ia melanjutkan bahwa kelemahan ini juga terlihat dari sistem perizinan yang kompleks dan rawan praktik suap – beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK, seperti yang menimpa Nur Alam yang merupakan kasus pemberian izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, Hariadi Kartodihardjo, mengatakan, sejak awal adanya Nota Kesepahaman Bersama (NKB) KPK dengan kementerian dan lembaga terkait dalam GNP-SDA, banyak political will ter-

tuang dalam kebijakan dan peraturan yang memiliki harapan.

Oleh karena itu, Hariadi mengatakan, “Perlu pengawasan KPK yang tertuang dalam GNP-SDA yang diharapkan memutus ragam mata rantai yang dapat memungkinkan, menyuburkan, melegitimasi dan mewariskan korupsi terjadi.”

Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya salah satu upaya yang diperbaiki di sektor pertambangan. Meski begitu, nyatanya praktik perizinan yang tidak patuh hukum masih terjadi. Kegiatan pertambangan kemudian dituding sebagai penyebab utama berbagai bencana alam yang berimplikasi pada kerugian negara.

Tercatat sekitar Rp28,5 triliun potensi penerimaan yang hilang akibat persoalan administrasi dan buruknya sistem perizinan, serta lemahnya sistem pengawasan. Hingga 2017, Tim Korsup KPK mencatat jumlah tunggakan PNBP mencapai Rp25,5 triliun. IUP yang tercatat di Dirjen Pajak adalah 7.519, namun hanya 84% di antaranya yang memiliki NPWP, sisanya tidak

teridentifikasi. Dari perusahaan yang memiliki NPWP tersebut, hanya 88% di antaranya yang melaporkan SPT tahunannya.

Dalam perjalanannya, GNP-SDA mendorong agar penataan IUP dilakukan melalui penerbitan Permen ESDM 43/2015 sebagai dasar hukum penataan perizinan. Kebijakan ini, kata Wawan, berhasil mengurangi jumlah IUP Non-CNC secara nasional, dari 4.877 IUP pada tahun 2014 menjadi 2.631 IUP per September 2018.

“Kebijakan lain yang ditempuh juga pemblokiran pelayanan publik terhadap 2.509 IUP Non CnC dan 2.011 IUP yang habis masa berlakunya di akhir tahun 2017,” katanya.

Kebijakan selanjutnya yang ditempuh adalah pemutakhiran data melalui forum rekonsiliasi IUP Pusat-Daerah dan pengembangan Minerba One Data Indonesia (MODI). Pengembangan satu peta ESDM ditempuh dengan mengembangkan Minerba One Map Indonesia (MOMI) yang terintegrasi dengan ESDM Geoportal, standardisasi peta dan koordinat. ●

MUARA TERAKHIR PELINDUNG BUMI

GNP-SDA MENDORONG 34 PROVINSI MENETAPKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELINDUNGI LAUT DARI “TANGAN-TANGAN NAKAL”. KEHEBATAN LAUT HARUS DIJAGA DEMI MASA DEPAN.



Pasar Ikan – Kegiatan jual beli hasil laut di daerah Banten, Jawa Barat

Sejak 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian mengenai Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan. Ada berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan ruang laut dan sumber daya laut yang masih belum optimal. Di sana, KPK memberikan rekomendasi agar pemerintah menegakkan kedaulatan atas wilayah laut Indonesia serta memperbaiki tata kelola laut dan mengelola sumber daya laut demi kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari kajian itu, KPK melalui Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamuri mengatakan bahwa peraturan daerah itu menjadi sebuah instrumen penting bagi dasar izin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Tanpanya, maka konflik pemanfaatan sumber daya akan terus ter-

jadi dan mengancam kawasan pesisir dan pulau kecil.”

Tak hanya itu, dampak negatif yang lebih luas akan mengancam kawasan itu jika tidak dilakukan pengaturan dan pengelolaan wilayahnya.

“Degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi dan konflik antar pemangku kepentingan akan sulit diatasi,” ujar Brahmantya.

Dengan peraturan daerah itu, maka kewenangan pengelolaan perairan titik 0 hingga 12 mil dari bibir pantai akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

Senada dengan itu, Peneliti dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Epakartika juga mengatakan bahwa peraturan daerah ini penting guna memastikan kegiatan perizinan bebas dari segala perilaku korupsi, terutama penyuapan. “Karena salah satu faktor suap-menyuap dalam perizinan itu karena kekosongan regulasi, lemahnya pengawasan, conflict of interest, dan state capture.”

Epa menyampaikan, dalam upaya penyelamatan laut, GNP-SDA fokus pada tiga hal, yaitu kedaulatan negara akan batas teritorial di laut, peng-

aturan tata ruang dan pengelolaan laut. Dengan mengetahui batas teritori di laut, pemerintah juga bisa mengatur lalu lintas laut, perdagangan, bea cukai, imigrasi, hingga perbatasan pertahanan negara.

Sejak 2017 hingga Mei 2019, sudah 21 provinsi yang telah menetapkan peraturan daerah tentang RZWP3K. GNP-SDA terus mendorong pemerintah agar seluruh provinsi segera melakukan hal ini.

“Kita masih punya kesempatan untuk mengawasi penyusunan tata ruang laut, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional. Jangan sampai kerusakan di darat terjadi juga di laut.”

Perbaikan lainnya juga dilakukan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat regulasi maupun tata laksana pemungutan. Dalam hal ini, GNP-SDA berupaya membangun kerja sama pertukaran data antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Pajak.

“Karena sistem perpajakan yang menganut self-assessment reporting membutuhkan banyak data pembed-

ing untuk melakukan verifikasi laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak,” ujar Epa.

KPK mendorong kerja sama antara KKP dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan koordinasi pengawasan dan penyidikan, sinkronisasi program dan kebijakan serta pemanfaatan data dan informasi. Upaya tersebut cukup berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Selama periode 2014-2017 peningkatan yang signifikan terjadi di sektor kelautan dan perikanan, yakni 56,47%.

Peningkatan signifikan terjadi pada PNBP perikanan, dari Rp79,2 miliar naik menjadi Rp491 miliar. Kenaikan itu didorong oleh penataan perizinan kapal dan penegakan hukum yang intensif dilakukan oleh KKP sehingga mendorong kepatuhan dari pelaku usaha untuk membayar PNBP.

Epa menggambarkan jika laut memiliki peran yang begitu penting sebagai muara dari segala persoalan SDA. “Laut akan menjadi muara dari segala kerusakan akibat persoalan SDA, maka laut harus memiliki kemampuan yang sangat luar biasa,” kata Epa. ¹

‘DEMIT’ YANG MELEK TEKNOLOGI

KEMASAN INFORMASI YANG MENARIK DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG TEPAT. SIAPAPUN YANG MERACIK, BISA MENJADI KEUNGGULAN YANG INOVATIF. ‘DEMIT’ TELAH MELAKUKANNYA.

Dahulu, desa diidentikkan dengan tempat yang terbelakang dari pembangunan, miskin dan minim teknologi. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, anggapan itu perlahan berubah.

Tengoklah salah satu desa yang terletak di bagian paling barat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa Dermaji namanya, yang terkenal lantaran masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 yang dikeluarkan Kemen-

terian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Desa ini memiliki inovasi yang menarik sebagai “Demit”. Bukan Demit yang dalam Bahasa Jawa berarti makhluk halus serupa jin. Tapi Demit yang dimaksud merupakan kepanjangan dari “Desa Dermaji Melek Informasi dan Teknologi”.

Ya, sang kepala desa, Bayu Setyo Nugroho memosisikan Desa Dermaji sebagai desa yang jauh dari kesan kuno dan ketinggalan zaman melalui terobosan di bidang informasi dan teknologi berupa situs desa yang bisa diakses pada laman www.dermaji.desa.id.

Bayu yang pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 11 tokoh muda inspiratif dalam acara Star Awards for Inspiring Young Leader (IYL) 2014 versi sebuah media daring, yakin kalau masyarakat Dermaji mampu maju dan bersaing melalui situs untuk mengem-

bangkan potensi dan transparansi tata kelola desa.

Apa saja yang bisa dilakukan warga desa melalui situs tersebut?

Tak hanya mendapat informasi dasar mengenai sejarah dan perkembangan desa, warga juga bisa mengakses sejumlah layanan, semisal layanan administrasi kependudukan, layanan informasi publik, dan layanan sosial dasar.

“Dan untuk mendapatkan semua layanan itu, tidak dipungut biaya. Kalau ada pungli, bisa dilaporkan,” kata Bayu.

Semua informasi, kata Bayu yang menjabat sebagai kepala desa sejak 2005 itu, dibuat sedetail mungkin. Seperti persyaratan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat pindah, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), tertera di situs tersebut.



Barcode Informasi – Pemerintah Desa Dermaji menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses dengan cara memindai *barcode*.



Untuk mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana desa tidak hanya ditempatkan sebagai sebuah institusi negara, melainkan juga berperan sebagai badan publik, maka situs Dermaji kemudian berkembang menjadi medium transparansi publik. Keredaksian situs juga digarap secara lebih serius, di bawah pimpinan sekretaris desa agar informasi yang ada bisa dikemas lebih menarik dan dipahami masyarakat.

Hasilnya, bisa kita lihat. Misalnya informasi perencanaan Dermaji dalam bentuk infografis “Master Plan 2025” yang memuat sejumlah rencana pembangunan. Mulai dari jembatan, ruas jalan, sentra budaya, sentra kuliner, jaringan air bersih, perpustakaan, area wisata hingga gelanggang olah raga. Selain itu, semua peraturan desa dan pengelolaan keuangan desa, juga bisa diunduh, sehingga warga desa bisa memahami arah pembangunan Dermaji.

Inovasi dalam bentuk penyajian informasi, tak berhenti sampai di situ. Bayu juga menyajikan informasi potensi desa ini. Pada menu “Kunjungi”, kita bisa mengetahui informasi wisata yang bisa dilakukan di Desa Dermaji. Ada Wisata Alam Wamasuta, Museum

Naladipa, Festival Dermaji dan Festival Kambing. Semua informasi, disajikan dengan konten yang lengkap dan atraktif.

“Kami buat Museum Naladipa, ada di lantai dua kantor desa, dan di sana terdapat benda-benda tradisional hasil sejarah dari Desa Dermaji, benda-benda tersebut kita berikan QR code agar warga dapat memindai menggunakan gadget-nya kemudian akan terhubung ke situs web Dermaji,” terang Bayu dengan antusias memperkenalkan inovasi desanya kepada *integrato*.

QR code tersebut juga akan ditempel di beberapa fasilitas umum ataupun gedung-gedung yang dibangun pemerintah desa, misalnya Aula Kantor Desa, jembatan dan lainnya. Bayu mengatakan cara tersebut akan lebih mendorong warga untuk menggunakan gawainya (gadget) dengan aktif untuk mengakses laman situs Dermaji.

Inovasi pada situs semakin memperkuat peran desa untuk maju dan berkembang secara masif. Adanya pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa tentu akan mengoptimalkan layanan publik dan memunculkan potensi desa. Hal ini juga diperkuat dengan partisipasi publik dalam peng-

awasan tata kelola desa.

Inovasi yang belakangan dilakukan, Bayu menambahkan menu “Belanja”. Ia seolah membaca peluang dari tren belanja online yang cenderung meningkat. Fitur yang dibuat mirip marketplace pada umumnya. Pada menu ini, pengunjung bisa berbelanja beragam produk hasil produk warga desa, yang dibuat dalam sejumlah kategori, seperti meubel, kerajinan, aksesoris dan makanan.

“Kami merintis semacam e-commerce, fungsinya sebagai media promosi potensi dan produk desa. Ada kerupuk ketela, produk kuliner lainnya, serta beberapa hasil kerajinan tangan dari warga,” ujar Bayu.

Bayu mengakui, pengelolaan marketplace itu belum optimal karena sejumlah keterbatasan. “Namun kami bersyukur, kemarin ada warga yang produknya diborong ke Jakarta,” katanya.

Kisah perjalanan Dermaji, memang tak lepas dari kesadaran dan kecermatan sang kepala desa untuk mengolah informasi sekecil apapun dan mempublikasikannya melalui internet. Bila situs Desa Dermaji sudah dianggap baik, hal ini tentu berbeda pada awal Bayu menggunakan platform blog gratisan. Sejumlah transformasi situs terus dilakukan, hingga akhirnya situs tersebut bisa menggunakan domain desa.id.



1. **Evaluasi** – Tim digital Desa Dermaji melakukan evaluasi secara berkala informasi yang disajikan dalam situs desa.
2. **Meninjau** – Kepala Desa Dermaji Bayu Setyo Nugroho menunjukkan salah satu benda sejarah desa.
3. **Kunjungan** – Siswa SD berkunjung ke Museum Naladipa sebagai sarana dokumentasi sejarah desa dan ruang belajar publik.





RELAWAN ITU PERLU RUANG

Bayu Gawtama

Pendiri Sekolah Relawan

Lebih dari 17 tahun lamanya Bayu Gawtama mendedikasikan diri menjadi relawan. Mulai dari relawan untuk memajukan literasi hingga turun di daerah bencana alam. Selama itu, Bayu melihat tingginya antusiasme masyarakat Indonesia yang bersedia menjadi relawan. Namun, di sisi lain, ia melihat para relawan memiliki niat baik, namun tidak diimbangi dengan *skill* dan pengetahuan yang mumpuni. Keresahan itu yang mendorong Bayu untuk membuat sebuah lembaga pendidikan bagi para relawan. Sekolah Relawan, satu-satunya lembaga sosial masyarakat yang memiliki fokus untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan para relawan. Ia dirikan lembaga ini bersama dua rekannya Dony Aryanto dan Roel Mustafa, enam tahun lalu, tepatnya 13 Januari 2013 di kota Depok, Jawa Barat. Bagaimana sepak terjang Bayu dalam mendorong semangat kerelawanan bersama lembaga yang didirikannya, berikut petikan perbincangan *integrato* pada awal Agustus lalu:

Menurut survei World Giving Index 2018 yang dirilis Charity Aid Foundation, Indonesia yang merupakan negara paling dermawan di dunia. Menurut anda?

Kerelawanan di Indonesia itu memang luar biasa. Kalau di Malaysia, orang diajak jadi volunter itu pasti nanya “dapat berapa?”. Kalau misalnya ada pelajar atau mahasiswa yang punya kesadaran menjadi volunter, dan mau minta izin sama orangtuanya, mereka pasti nanya “emang dapat bayaran berapa?”. Kemarin kami kunjungan ke 8 NGO di Malaysia, keluhan mereka seperti itu.

Sementara di Indonesia, orang enggak punya duit saja bisa jadi volunter. Artinya, jiwa kerelawanan ini harus kita banggakan. Singapura dan Hongkong sama seperti Malaysia situasinya.

Pada akhirnya kita bisa menilai bahwa survei tersebut pas, karena penilaiannya dari tiga hal, yaitu *voluntary, care for other*, dan dari filantropinya itu sendiri. Survei itu cukup mewakili keadaan di Indonesia.

Apa yang masih jadi masalah dunia filantropi Indonesia?

Banyak. Kalau volunter itu lebih ke *skill*. Saya selalu bilang ke banyak forum kalau orang Indonesia itu luar biasa “gila” kalau dipanggil menjadi volunter, semuanya mau. Saya dari (kejadian) Tsunami tahun 2004 sering di dunia kebencanaan, enggak habis-habisnya tuh orang Indonesia jadi volunter. Cuma akhirnya, kita lihat enggak semua orang yang datang dengan *skill* dan pemahaman yang cukup. Padahal *skill* ini penting untuk mereka kerja di lapangan, mereka harus tahu apa yang dia lakukan, bagaimana cara melakukannya.

Sejak kapan berkecimpung di dunia kerelawanan?

Sebenarnya awalnya menjadi relawan di bidang literasi. Di tahun 2002 saya bersama teman-teman bergabung dalam komunitas 1001 buku. Komunitas literasi yang mengumpulkan buku, kemudian hasilnya kita kirim ke taman-taman bacaan jalanan un-

tuk kaum-kaum miskin.

Kalau di bencana, pas tsunami saya kesana masih dengan komunitas 1001 buku. Kemudian karena saya background-nya jurnalis, kemudian saya diundang sama ACT, Aksi Cepat Tanggap. 2005 saya bergabung dengan ACT dari mulai jadi manajer komunikasi sampai jadi komandan rescue dan terakhir jadi direktur program sampai tahun 2013 awal.

Saya keluar dari ACT saya mendirikan Sekolah Relawan. Karena saya melihat banyak ‘PR’ di dunia kerelawanan. ACT enggak hanya fokus di dunia bencana, tapi ada juga program pemberdayaan masyarakat.

Kenapa tidak bergabung dengan organisasi lain dalam melatih skill para relawan?

Tidak ada organisasi seperti Sekolah Relawan. Artinya, tidak ada organisasi yang punya fokus pada dunia edukasi dan pengembangan *skill* kerelawanan. Sampai saat ini kami merasa Sekolah Relawan masih sendiri.

Saya mendirikan Sekolah Relawan karena belasan tahun saya beraktivitas di dunia kerelawanan, saya melihat dua hal. Pertama, antusiasme orang menjadi relawan sangat tinggi. Kedua, antusiasme tinggi tapi seringkali tidak dibarengi dengan *skill* dan pemahaman yang cukup sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam penanganan bencana di lapangan oleh para relawan yang tidak punya *skill*. Nah akhirnya itu memunculkan sebuah ide perlu ada sebuah lembaga yang secara serius memikirkan pelatihan dan edukasi kerelawanan.

Seharusnya relawan punya kompetensi apa saja?

Yang pertama itu *leadership*, kedua manajerial, ketiga *attitude*, mental. Bicara soal *attitude* itu integritas. Yang terakhir baru *skill* teknis. *Skill* teknis menurut saya belakangan, yang utama justru *leadership* dulu, manajerial dulu, *attitude* dulu baru *skill* teknis, seperti tali temali, panjat tebing, bisa melakukan aktivitas evakuasi dan lainnya. Itu bisa belajar bersama.

Makannya salah satu pelatihan yang Sekolah Relawan punya itu Disaster *Leadership* Training. Jadi yang kita latih bukan cuma *skill* tekniknya tapi juga manajerial dan *leadership*-nya. Karena banyak orang di lapangan, relawan bisa ngumpul banyak banget tapi enggak ada yang memimpin. Jadi kadang-kadang relawan itu menunggu perintah. Kalau enggak ada yang perintah, mereka enggak jalan. Nah kita perlu banyak leader.

Adakah konsep kerelawanan yang sudah maju di dunia?

Menurut saya, sebenarnya yang banyak mengembangkan konsep kerelawanan justru Indonesia. Banyak negara-negara lain *benchmark*-nya ke Indonesia, seperti Filipina, dan beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang punya manajemen kerelawanan yang cukup bagus. Kita juga harus bangga, Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) itu salah satu yang terbaik di Asia.

Apakah dunia kerelawanan sebanding dengan tingkat kedermawanan di Indonesia?

Harusnya sebanding. Harusnya ini *triangle*, antara kedermawanan, filantropi, dan sektor bisnis. Ini harus kerja sama. Jadi kedermawanan tinggi, kerelawanannya tinggi dan didukung oleh korporasi dan pemerintah. Semuanya harus sama-sama kuat.

Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lembaga sosial?

Saya kira banyak. Sekolah Relawan punya training namanya Volunter Management Training, kita juga banyak melatih komunitas-komunitas. Jadi akhirnya juga banyak yang memberikan insight-insight kepada komunitas yang mengelola relawan.

Apa yang sebenarnya dibutuhkan relawan?

Pertama, ruang, kesempatan untuk berkreasi, kesempatan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu yang dia

punya. Karena orang mau jadi volunter itu bukan karena dia enggak punya kegiatan, tapi karena mereka punya potensi, dan mau diarahkan ke mana potensi yang mereka punya.

Sayangnya banyak komunitas yang tidak pandai membaca itu. Contohnya, ketika mereka membuat program-program yang tidak menarik atau tidak sesuai dengan yang diinginkan volunter. Mereka jadi merasa kesulitan merekrut relawan. Padahal bukan kesulitan merekrut relawan, tapi harus dimulai dengan organisasinya sendiri buatlah program yang menarik minat relawan. Jadi saran saya kepada komunitas yang mengelola relawan, pertama, buatlah program yang menarik. Kedua, berikan kesempatan sebesar-besarnya untuk para relawan berkreasi.

Kalau dalam bahasa kami, untuk relawan kita mulai dengan ruang bukan dengan uang.

Karena memang yang dicari relawan adalah ruang atau kesempatan berkreasi. Kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk relawan berkreasi, berimprovisasi, mengembangkan dirinya. Kalau ruang itu dia dapatkan di organisasi itu, maka dia akan bertahan lama di organisasi itu.

BIODATA
NAMA
Bayu Gawtama
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
10 Februari 1974
RIWAYAT ORGANISASI
Komunitas 1001 Buku (2002 – Berjalan)
Yayasan Sahabat Peduli (2008 – Berjalan)
Sekolah Relawan (2013 – Berjalan)
KARYA BUKU
Berhenti Sejenak, Melihat Lebih Dalam untuk Memperbaiki Diri
School of Life
Berguru pada Kehidupan

LELANG BARANG RAMPASAN

Pasal 273 Ayat 3 KUHAP

“Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”

PROSES AWAL

Jaksa menerima putusan inkrah dari pengadilan



Eksekusi putusan pengadilan sesuai **Pasal 273 Ayat 3 KUHAP & PMK08/PMK.6/2018** tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang



Permintaan appraisal ke **KPKNL/Kanwil/DJKN**



Hasil penilaian appraisal keluar dan berlaku selama **6 bulan**



Lelang dilaksanakan di kantor pejabat lelang (**KPKNL**)



Risalah Lelang sebagai akta otentik pengganti akta jual beli



Hasil lelang disetor ke Kas Negara melalui **KPK**

KETERANGAN

KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pejabat Lelang = Orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Appraisal = penaksiran, pemberian angka (rating) serta penilaian, di mana hasil kebijakan dari penganalisaan arti satuan nilai terhadap sesuatu yang nyata.

KOMISI DARI FARMASI

Andy, via twitter

Apakah benar komisi farmasi untuk dokter bukan termasuk gratifikasi? Saya pribadi lebih senang jika dokter tidak lagi bersentuhan dengan komisi-komisi itu.

Apabila yang anda maksud adalah komisi yang diberikan kepada pribadi dokter oleh perusahaan farmasi itu merupakan gratifikasi yang dilarang. Permenkes No. 58 tahun 2016, mengatur *sponsorship* bagi tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dengan prinsip yaitu:

1. Tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan kesehatan
2. Tidak dalam bentuk uang atau setara uang, tidak diberikan langsung kepada individu
3. Sesuai bidang keahlian
4. Diberikan secara terbuka
5. Dikelola secara akuntabel dan transparan

Hibah untuk Polisi

Mulyono, via twitter

Apakah oknum polisi yang menerima hibah dari kepala desa bisa dikategorikan gratifikasi?

Apabila hibah diberikan kepada pribadi polisi tersebut maka dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang, jika hibah diberikan kepada instansi seperti Polsek, itu bukan gratifikasi yang dilarang, maka terbuka saat pemberiannya serta tercatat sebagai aset pendukung kinerja kepolisian.



Jual Voucher Hasil Gratifikasi, Boleh?

Bobby Jovan, via twitter

Saya punya kenalan PNS yang beberapa kali menjual voucher belanja dengan harga miring. Belakangan saya tahu, voucher itu dia dapat dari vendor *Event Organizer* (EO) di tempat dia bekerja, apakah boleh?

Memperoleh voucher gratis dari EO yang bekerja sama dengan tempat ia bekerja adalah praktik gratifikasi yang dilarang, terlebih lagi voucher itu dijual kepada para koleganya. Praktik itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Terkait hal ini, bapak/ibu dapat menginformasikan kepadanya bahwa hal itu dilarang oleh undang-undang.



KEJUJURAN MENGISI LHKPN

Hamdan, (via twitter)

Apakah ada sanksi bagi pelapor yang tidak jujur menyampaikan LHKPN-nya?

Bagi penyelenggara negara yang telah mengirimkan e-LHKPN ke KPK dan status pelaporan di aplikasi tertulis proses verifikasi, maka tim KPK akan melakukan verifikasi untuk mengecek kelengkapan administrasi pelaporan tersebut. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka status pelaporan pada aplikasi akan berubah menjadi terverifikasi lengkap, dan kami akan mengirimkan tanda terima LHKPN ke alamat surel yang didaftarkan dan kotak surat e-filling e-LHKPN. Namun sebaliknya, apabila masih terdapat kekurangan dokumen kelengkapan seperti lampiran surat kuasa dan bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan maka akan diinformasikan juga dalam bentuk daftar kekurangan dokumen ke alamat surel tersebut, sehingga jika anda belum menerima tanda terima ataupun surel terkait proses verifikasi pelaporan agar dapat mengecek kembali surel yang didaftarkan atau dapat mengecek kotak surat e-LHKPN Bapak/Ibu.

Aplikasi e-LHKPN Sulit Dimengerti

Surjana, (via twitter)

Saya banyak mengalami kesulitan pengisian e-LHKPN, apakah ada bantuan atau arahan untuk mengisinya?

Untuk panduan terkait dengan pengisian e-LHKPN melalui situs web e-LHKPN, dapat dilihat pada menu panduan di situs web elhkpn.kpk.go.id. Jadi ketika wajib lapor atau penyelenggara negara membuka situs web, silakan masuk ke menu panduan aplikasi disitu nanti akan tersedia panduan dalam bentuk video dan dokumen PDF.

MERIAHKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Gebukan drum, tiupan terompet, hingga sirene dari pengeras suara terdengar riuh di Aula Gedung Merah Putih KPK saat Final kegiatan “KPK Got Talent” pada Kamis (15/8). Kegiatan ini mencari bakat-bakat baru pegawai di bidang seni hiburan.

Suasana yang tak kalah meriah, juga bisa disaksikan pada kegiatan Lomba Busana Daerah yang diselenggarakan pada Jumat (16/8) di Lobi Utama Gedung Merah Putih, Jakarta. Kegiatan itu diikuti puluhan pegawai berusana berbagai daerah dari setiap unit kerja.

Sejumlah kegiatan itu diselenggarakan oleh Wadah Pegawai KPK (WP KPK) dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-74. Sejumlah perlombaan lainnya juga digelar usai upacara 17 Agustus, seperti lomba tarik tambang, makan cepat, dan estafet rotan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengatakan kegiatan bertujuan selain turut merayakan HUT Indonesia, juga menguatkan soliditas dan kekompakan di antara pegawai. Sebab tak bisa dimungkiri, rutinitas pekerjaan kerap membuat pegawai jenuh dan stres

“Karena itu, ini juga menjadi sarana hiburan bagi pegawai agar kembali prima dalam menjalankan tugas,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengapresiasi berbagai kegiatan dan partisipasi para pegawai. “Saya tidak menyangka ternyata pegawai KPK banyak memiliki bakat yang luar biasa,” katanya.

Basaria juga berharap, dari kegiatan ini, para pegawai bisa memaknai kemerdekaan Indonesia. “Kita, para pegawai dan pimpinan, harus memaknai kemerdekaan ini dengan kerja keras dalam perjuangan dalam memberantas korupsi,” katanya. 📍



KPK got Talent - Pegawai KPK menunjukkan penampilannya dalam ajang KPK got Talent 2019.

Hand-drawn doodles including a beach ball, crayons, a telescope, a car, a castle, a cloud, a pencil, a ruler, a globe, a pencil, a ruler, a bear, a palette, a planet, a question mark, a hand with a heart, a rocket, a puzzle piece, a sailboat, a sun, and a zigzag line.

IMAGINATION

JOYFUL

TEMUKAN LIMA PERBEDAAN

CURIOSITY



WASPADAI KPK PALSU



KPK KP K K.P.K

Contoh deretan huruf K dan P di atas bisa dirangkai dengan beragam sentuhan seperti memakai spasi atau tanpa spasi, menggunakan titik atau tanpa titik. Bagi yang tak biasa mengenal simbol, contoh di atas mungkin akan terlihat sama saja.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang disingkat KPK menemukan banyak sekali penipuan yang terkait nama KPK. Apa dan bagaimana cara mengetahuinya?

1

Mengatasnamakan KPK

Datang dari perorangan, lembaga maupun organisasi yang mengaku dirinya adalah perwakilan dari KPK

2

Menyalahgunakan atribut/logo KPK

Datang dari perorangan, lembaga maupun organisasi yang dengan sengaja memalsukan kartu tanda pengenal kepegawaian KPK ataupun membuat logo yang menyerupai lambang KPK untuk disalahgunakan demi kepentingan pribadi

Ingat 4 Hal Ini

No Kontak KPK: 021-2557 8300
(dengan kode area Jakarta).



Call center KPK: 198.

Pegawai KPK selalu memperkenalkan diri berupa nama, dari bagian apa, dan keperluannya.

Dalam menjalankan tugas, Pegawai KPK tidak akan meminta bayaran atau imbalan apapun kepada masyarakat.

Jika ada yang sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada KPK Palsu, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat.

Waspadalah!

NASIB PARA PENGUNGKAP FAKTA

DI TANGAN MEREKA,
KEBENARAN DAN
KEBERANIAN MENJADI
SANGAT BERNILAI. ADA
HARGA YANG TERAMAT
MAHAL UNTUK MENEBUS
SEBUAH FAKTA. MESKI
NYAWA JADI TARUHAN NYA.

Suasana Desa Bidjina pagi itu masih sama seperti biasanya, tenang khas pedesaan dengan aroma dedaunan segar yang tumbuh di halaman. Daphne menghabiskan waktunya di atas meja makan bersama putra sulungnya Matthew Caruana Daphne.

Bukan untuk makan bersama. Ia tenggelam dalam pekerjaannya yang sedang menyoroti tingkah anggota legislatif dan situasi politik terkini di Malta. Lewat tulisannya, ia menuliskan bahwa situasi politik di Malta saat ini berada dalam keadaan 'putus asa'. Selesai menulis, Daphne mengunggah tulisan itu ke dalam blog pribadinya.

Sore harinya, sekitar pukul tiga sore, perempuan berusia 53 tahun itu teringat bahwa ia harus mengurus sesuatu di bank. Karena takut terlambat, ia pun bergegas merapikan laptop dan beberapa barang di atas meja.

Saat keluar dari rumah, seperti biasa dia memastikan tidak ada barang yang tertinggal, lalu melaju cepat dengan mobil pabrikan Prancis berwarna abu-abu kesayangannya. Baru seratusan meter, mobil itu meledak akibat bom yang dipasang di bawah kursi pengemudi. Bom itu mengakibatkan mobil berguling ke ladang, membakar seluruh sisi mobil, termasuk isinya.





1

1. Daphne Caruana Galizia
2. **Dibunuh** – Mobil Daphne Caruana Galizia yang sudah terbakar karena dipasang bom dibawah kursi kemudinya.
3. Jan Kuciak.



2



3

Matthew yang tetap di meja makan, terkejut mendengar suara ledakan yang keras itu. Kata hatinya menyuruh ia berlari ke arah suara ledakan yang tidak jauh dari rumahnya. Dengan mata kepala sendiri, ia menyaksikan pohon terbakar, pecahan kaca, bahkan potongan daging.

Ia terus berlari mengikuti suara klakson mobil yang terus berdentung, berharap itu bukan mobil milik ibunya. Namun, ia hanya bisa terdiam saat ia mendekati mobil yang telah terbakar itu dan sangat mengenali mobil itu, plat nomor mobil itu, dan jasad ibunya.

Pembunuhan Daphne Caruana Galizia pada Senin, 16 Oktober 2017, diduga kuat telah direncanakan dengan sangat matang. Bom yang dapat dikontrol dari jarak jauh itu, dipasang di bagian bawah kursi pengemudi. Pembunuhan Daphne diduga erat kaitannya dengan investigasi yang tengah ia tulis dalam blog pribadinya mengenai du-

gaan korupsi di jajaran tingkat tinggi Pemerintah Malta.

Saat itu, Daphne tengah mengungkap kasus jaringan korupsi yang dilakukan Menteri Ekonomi Malta, Christian Cardona, termasuk penggunaan anggaran dinas yang digunakan untuk mengunjungi tempat prostitusi di Jerman.

Blog-nya yang populer, “Running Commentary” memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia politik Malta. Dalam tulisannya, Daphne menduga sang Perdana Menteri Joseph Muscat dan istrinya, Michelle, terlibat dengan skandal Panama Papers, dan memberi keuntungan bagi perusahaan Michelle. Ia juga menelusuri keterlibatan Kepala Staf Energi Malta dalam skandal itu.

Selama menjadi jurnalis, kerap Daphne membuat ‘gerah’ sejumlah pihak di Malta, dan karenanya ia sering menerima ancaman. Bahkan, tepat 15 hari sebelum hari kematiannya, ia sempat melapor ke polisi bahwa ia mene-

“Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Pemimpin yang dianggap diktator pun tidak bisa melawan kekuatan rakyat”

rima ancaman pembunuhan.

Daphne adalah seorang jurnalis investigasi terkemuka yang telah menyelidiki kasus-kasus korupsi selama 30 tahun. Sosok Daphne dijuluki sebagai “One-Women Wikileaks” karena sering mengungkapkan kasus korupsi lewat liputan investigasinya yang ia muat dalam blog-nya.

Selain Daphne, nasib serupa juga dialami Jan Kuciak karena mengungkap kasus korupsi di Slovakia. Menurut keterangan polisi setempat, motif pembunuhan Jan Kuciak berhubungan dengan laporan investigasi yang sedang dilakukannya mengenai skandal korupsi yang melibatkan mafia Italia dan

elite politik tingkat tinggi di negara itu.

Hasil investigasi Kuciak mengungkap adanya intervensi mafia Italia terhadap sang Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Kuciak menggambarkan dugaan hubungan antara keluarga mafia Italia dan dua pembantu senior sang Perdana Menteri, yakni Sekretaris Dewan Keamanan Viliam Jasan dan Penasihat Negara Bagian Maria Troskova. Laporan Kuciak membeberkan bahwa dua pejabat itu memiliki perusahaan bersama dengan pihak keluarga mafia Italia.

Laporan itu, justru mengantarkan Kuciak pada kematian. Pada 26 Februari 2018, Kuciak bersama tunangannya, Martina Kusnirova sedang berada di rumah mereka di Velka Maca, sebuah desa di timur Bratislava. Mereka kedatangan ‘tamu’ yang mengancam Kuciak agar proses investigasinya dihentikan.

Penolakan Kuciak dibayar dengan peluru yang menembus jantungnya. Nasib yang sama, sang tunangan juga tewas dengan peluru yang bersarang di kepalanya.

Kematian Kuciak memicu kemarahan warga yang kemudian melakukan demonstrasi oleh lebih dari 50 ribu orang pada 9 Maret 2019 di ibukota Slovakia, Bratislava. Mereka menuntut transparansi pengusutan kasus pembunuhan terhadap Kuciak.

Pihak kepolisian sebelumnya sudah menahan tujuh orang terkait pembunuhan berencana itu. Akan tetapi beberapa jam usai pemakaman Kuciak, tujuh orang itu dibebaskan. ●

BERBAGI PERAN TINGKATKAN LITERASI

RENDAHNYA TINGKAT LITERASI, MENJADI TUGAS BERSAMA. DIPERLUKAN UPAYA KREATIF AGAR MASYARAKAT BISA MELEK DAN CERDAS LITERASI.



Bocah berusia sembilan tahun itu duduk berdampingan dengan tiga temannya. Tangannya memegang sebuah buku cerita bergambar setebal 24 halaman. Najwa Aulia nama bocah itu, yang rajin mengunjungi rumah baca Fun with English (FWE) di kawasan Jakarta Pusat. Sambil menunggu kelas bahasa Inggris, ia sering berkunjung ke ruang baca dan meminjam 10 buku dalam sebulan.

Rumah baca ini didirikan Asril Amin atau yang biasa disapa Abah Acil beserta istrinya, Nila sejak 12 tahun lalu. Dari rumah baca itu mereka berharap

akan memberi pencerahan literasi kepada anak-anak sehingga generasi di masa mendatang akan lebih baik, meskipun keterbatasan dan tantangan selalu dihadapi.

“Saya sering memberikan motivasi ke anak-anak, dengan membaca kamu akan lebih cerdas. Dengan begitu masa depan kamu akan lebih baik,” ujar Abah Acil kepada *integrito*, pertengahan Agustus lalu.

Abah Acil tetap semangat berkat bantuan dari orang-orang yang peduli dengan gerakan literasinya. Seperti komunitas 1001 Buku, yang rajin mem-

bantu menggalang buku untuk rumah baca FWE, yang menjadi salah satu dari 800 jaringan taman baca Komunitas 1001 Buku. Misi Komunitas 1001 Buku cukup sederhana, yaitu mengumpulkan buku untuk disalurkan ke berbagai taman baca di seluruh Indonesia yang telah mereka mulai sejak 17 tahun lalu.

Menurut relawan 1001 Buku Dwi Andayani, dalam sebulan komunitas ini bisa mendistribusikan sedikitnya 2.500 buku ke 25 taman baca jaringannya di seluruh Indonesia, salah satunya Rumah Baca FWE itu.

“Satu taman baca akan mendapat-

kan minimal seratus buku,” ujar Dwi, yang bekerja sama dengan berbagai instansi, perusahaan, sekolah, dan komunitas untuk menghimpun buku.

Komunitas ini menyasar anak-anak sebagai generasi harapan Indonesia di masa mendatang. Mereka yakin, dengan membaca buku, anak-anak itu akan tumbuh dengan baik yang pada akhirnya akan membawa perubahan bagi negeri ini.

“Ketika anak-anak sudah dibiasakan membaca buku, maka tumbuh kembang mereka akan baik. Kami percaya itu,” ujarnya.



Inovasi untuk meningkatkan kecerdasan literasi juga dilakukan masyarakat dalam beragam bentuk. Meski eksis sebagai grup musik, Hivi! juga ikut peduli dengan menyelenggarakan diskusi buku bersama pengemarnya.

Dalam kegiatan itu, setiap personel Hivi! dan para pengemarnya berbagi cerita tentang buku yang telah mereka baca.

Selain meningkatkan minat baca, Hivi! juga memiliki misi agar generasi muda lebih kritis menghadapi era “banjir informasi” yang justru membuat orang malas membaca.

Hivi! percaya, bahwa jika generasi muda memiliki minat baca yang tinggi pasti akan mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri.

“Dengan sering membaca, maka dia akan lebih banyak tahu dan lebih kritis dalam melihat banyak hal. Makanya, literasi itu penting sekali.”

Yang dilakukan komunitas Lemari Buku-buku tak kalah unik. Komunitas yang beranggotakan para kartunis ini, menggunakan keterampilannya untuk mengkampanyekan donasi buku bagi

masyarakat. Setiap donasi, akan digantikan dengan kartun wajah si donatur buku sebagai ucapan terima kasih.

Itulah yang akhirnya membuat Lemari Buku-Buku berdiri sejak 2013. Menurut Desta, salah seorang relawan, komunitas itu dapat mengumpulkan lebih dari 50 buku dalam sehari, yang selanjutnya didistribusikan ke sekolah yang minim koleksi.

Kini, gerakan ini sudah menjalar ke beberapa kota selain Jakarta, yakni Bandung Bogor, Semarang, Bali, Yogyakarta dan Malang.

Pengalaman bertahun-tahun menjadi relawan membuat Desta bersyukur. Pasalnya Desta kerap menemukan anak-anak yang kesulitan mendapatkan buku di berbagai pelosok daerah. “Sedih. Ketika melihat fakta bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia itu senang dengan buku, namun mereka kesulitan mendapatnya.”

Rendahnya tingkat literasi, memang memerlukan upaya semua pihak untuk mengatasinya. Sebuah penelitian dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)

Donasi Buku – Kegiatan donasi buku yang ditukar dengan lukisan wajah, digagas oleh Lemari Buku-Buku sejak 2013.

pada 2012, menunjukkan indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya, hanya ada satu orang yang memiliki minat baca dari setiap seribu penduduk.

Studi yang tak kalah membuat hati miris, juga dapat dilihat dari studi Central Connecticut State University pada tahun 2016 tentang ‘Most Literate Nations in The World’. Studi ini bahkan menyebutkan minat baca Indonesia menempati urutan ke-60 dari total 61 negara.

Rendahnya literasi, kini kian mendapat tantangan seiring perkembangan internet. Menurut pemerhati budaya dan komunikasi digital Dr. Firman Kurniawan, perkembangan teknologi telah membuat masyarakat lebih sering mengakses internet daripada membaca buku.

Menurutnya, ini merupakan dampak dari *internet of things*, di mana masyarakat sudah saling terhubung, dan hampir semua jenis kebutuhan sudah dipenuhi secara daring.

“Jadi kehidupan itu tujuh puluh persen sudah dilayani di perangkat digital. Akhirnya kegiatan apapun dialihkan ke sana (ponsel). Termasuk kegiatan membaca,” ujar dosen Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia ini.

Fakta ini terkonfirmasi dengan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2018 yang menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta pengguna, atau meningkat 10,2 persen dari 2017.

Inisiatif masyarakat dalam gerakan literasi seperti kisah di atas merupakan energi bagi pemerintah yang memang tengah getol melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan membentuk Gerakan Literasi Nasional sejak 2016.

Mendikbud Muhadjir Effendy yakin peningkatan literasi itu penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Sebab, “Ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang sangat kokoh dalam membangun tradisi literasinya,” ujarnya.

Setiap tahun, Kemendikbud memberikan bantuan dana kepada setiap Dinas Pendidikan di daerah untuk menggerakkan Gerakan Literasi Nasional. Nantinya, dana itu akan digunakan untuk mengembangkan literasi di daerah sekaligus memperkuat para pelaku gerakan literasi.

“Jika semua terlibat maka upaya mengembangkan budaya literasi akan semakin meluas.”

Fokus utama Gerakan Literasi Nasional ini meliputi literasi dasar yang terdiri dari enam aspek, yaitu literasi baca-tulis, numerasi, sains, finansial, digital, serta budaya dan kewarganegaraan. ◉

BERGERAK MELAWAN HOAKS

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI, JUGA DIIRINGI PEREDARAN BERITA BOHONG DENGAN CEPAT. TAK HANYA DIPERLUKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGENDALIKANNYA, JUGA DIBUTUHKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT DALAM LITERASI DI ERA DIGITAL.

Dalam sebuah rapat redaksi Majalah New Republic, Stephen Glass melaporkan hasil liputannya. Ia bertemu dengan bocah Ian Restil, seorang peretas terhebat sepanjang masa yang baru berusia 15 tahun. Jurnalis berusia 25 tahun itu bercerita kalau Ian berhasil membobol data sebuah perusahaan besar bernama Jukt Micronics. Dalam rapat itu, Glass meyakinkan para tim redaksi kalau ia juga hadir ke Konferensi Peretas Nasional.

Hasil liputan Glass kemudian terbit dengan judul Hack Heaven. Kemudian artikel tersebut 'menampar' Adam Peneberg, penulis portal online Forbes Digital. Sebagai media yang mengulas perkembangan teknologi, Forbes merasa kecolongan.

"Kenapa kamu tidak menuliskan hal ini? ujar sang editor senior Forbes

Digital, Kambiz Foorohar ketika itu.

Adam lantas menelusuri artikel Glass, agar bisa menulis topik yang sama. Namun, penelusurannya justru mempertemukannya pada banyak kejanggalan. Adam kemudian meminta konfirmasi ke New Republic atas keanehan itu melalui teleconference dengan Forbes Digital.

Dari konfirmasi sejumlah data pada artikel itu, justru membuat Lane yang merupakan atasan Glass di New Republic, turut curiga. Lane yang dikenal tegas, akhirnya juga mengecek fakta yang diklaim Glass dalam artikelnya, dengan membawanya ke tempat Konferensi Peretas Nasional itu diselenggarakan.

Singkat kata, Lane menemukan bahwa kejanggalan demi kejanggalan itu berujung pada kebohongan. Akhirnya, Glass pun dipecat, karena terbukti





melakukan kebohongan pada 27 dari 41 tulisan yang pernah ia tulis.

Kisah Stephen Glass dalam film *Shattered Glass* merupakan kisah nyata yang menggemparkan dunia jurnalistik Amerika pada 1998. Melalui film itu, kita dapat melihat berita bohong diciptakan begitu menarik sehingga semua orang terbuai mendengar ceritanya yang fantastis.

Berita bohong (disinformasi) atau hoaks dalam cerita di atas, bukanlah yang pertama terjadi. Alexander Boses dalam bukunya *Museum of Hoaxes* menyebutkan bahwa hoaks pertama yang dipublikasikan adalah penanggulangan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathon Swift pada tahun 1709.

Saat itu ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan, ia bahkan membuat obituari palsu dengan nama Partridge dan hari yang ia ramal sebagai hari kematiannya.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, Jurnalis Sains Amerika Serikat Benedict Carey dalam tulisannya di

The New York Times mengungkapkan bahwa peredaran hoaks tidak lepas dari peran media sosial.

“Media sosial memiliki kecepatan pertukaran informasi dan fitur share and repost.” Tulisnya.

Sebagai pengguna media sosial yang tinggi, tampaknya Indonesia harus mewaspadaai berkembangnya hoaks tanpa kendali. Hasil studi *Wearsocial Hootsuite* menunjukkan dari 282,2 juta jumlah penduduk di Indonesia, 150 juta atau sebesar 56 persen merupakan pengguna sosial media. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebab, menurut Direktur Informasi dan Komunikasi badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto bahwa konten-konten media sosial di Indonesia ternyata didominasi informasi palsu.

“Dari penelitian, informasi hoaks sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia,” ujar Wawan.

Apa yang menyebabkan peredaran

Mural - Salah satu ruang publik yang dihias mural dengan pesan antihoaks di daerah Rawa Buntu, Tangerang.

hoaks semakin liar?

Pemerhati budaya dan komunikasi digital Universitas Indonesia Dr. Firman Kurniawan menyebutkan dua penyebabnya. Pertama, manusia cenderung mengimitasi perilaku manusia lain. “Perilaku tertentu yang memiliki daya tarik akan diimitasi oleh manusia lain.”

Kedua, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan bisa bersumber dari keadaan *cognitive dissonance* atau keadaan yang tidak seimbang. Dalam keadaan itu, manusia tidak bisa konsisten mengerjakan apa yang ia pikirkan. Hal itu muncul karena adanya rasa cemas.

“Misalnya tersebar di media sosial kalau Jakarta akan menghadapi gempa delapan skala richter. Dalam pikiran kita cemas, namun tidak melakukan persiapan,” ujar Firman.

Ketika cemas, manusia cenderung mengkonfirmasi informasi ke orang

lain. Dalam hal ini, masyarakat mengkonfirmasi informasi tersebut dengan cara menyebarkannya ke orang lain. “Padahal informasi yang ia sebar itu adalah hoaks.”

Cepatnya peredaran hoaks, juga terkonfirmasi dalam jurnal *Science* yang diterbitkan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dalam penelitian itu terungkap bahwa berita bohong hanya memerlukan waktu 10 jam untuk bisa mencapai 1.500 pengguna Twitter. Sedangkan, penyebaran informasi asli membutuhkan waktu 60 jam untuk bisa mencapai jumlah pengguna yang sama.

Uniknya, para peneliti menemukan bahwa informasi asli tidak pernah *retweet* hingga 1.000 orang. Sebaliknya, satu persen dari berita palsu bisa *retweet* lebih dari 100 ribu orang.

Peredaran hoaks tentu berbahaya. Menurut Firman, berita bohong membuat masyarakat bingung menilai mana informasi yang benar dan mana yang bohong.

“Orang tidak tahu apa yang harus benar-benar dilakukan dan apa yang terjadi, sehingga tindakan mereka tidak berbasis pada kebenaran.”

Di dalam negeri sendiri, kehebohan akibat hoaks juga telah terjadi. Misalnya, saat gempa di Palu berkekuatan 7,4 Skala Richter (SR) pada 28 September 2018 lalu. Gempa tersebut juga menyebabkan tsunami yang menghantam pantai barat Pulau Sulawesi.

Tidak lama setelah kejadian gempa, sebuah pesan beredar melalui aplikasi, bahwa Palu dalam keadaan siaga satu dan akan terjadi gempa susulan berkekuatan 8,1 skala richter yang berpotensi tsunami. Kabar yang beredar mengakibatkan keresahan masyarakat Kota Palu yang masih mengalami trauma.

Namun informasi tersebut cepat dikonfirmasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui media sosialnya sebagai hoaks.

Sadar akan bahaya hoaks yang lebih luas, pemerintah telah membuat strategi dalam menghadapi peredaran hoaks yang semakin liar. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan bahwa Kominfo memiliki tiga pendekatan untuk melawan hoaks.

Pertama, melalui pendekatan literasi digital. Kemkominfo membentuk Siber Kreasi atau Gerakan Nasional Literasi Digital sejak tahun 2017. Sejak saat itu, Kominfo telah berkolaborasi dengan lebih dari 100 organisasi.

Lewat gerakan itu, Kemkominfo memberikan sosialisasi kepada pelajar-pelajar diseluruh Indonesia mengenai cara melawan hoaks.

“Kami datang ke sekolah dan kampus seluruh Indonesia untuk menyampaikan agar jangan sampai terpapar dan ikut menyebarkan informasi yang belum terungkap validitasnya.”

Kedua, melalui pendekatan hukum. Tiga tahun lalu, Kemkominfo mengajukan revisi atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perubahan ini menyebutkan bahwa pelaku penyambung hoaks bisa dipidana selama enam tahun dengan denda satu miliar rupiah.

Ketiga melalui teknologi. Sejak 28 Desember 2017 Kominfo telah memiliki mesin AIS atau mesin *crawling* untuk melakukan identifikasi terhadap berita hoaks yang beredar. Mesin ini didukung oleh 100 anak muda yang melakukan verifikasi berita hoaks yang beredar di internet termasuk media sosial. Berkat bantuan teknologi, hingga bulan Juli tahun 2019 Kominfo telah menutup 1,9 juta situs dan akun media sosial.

“Situs dan akun tersebut bukan hanya konten hoaks, tapi juga pornografi, radikalisme, dan terorisme,” ungkapnya.

Selain Kemkominfo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga membentuk tim Saber Hoax untuk menangkal informasi hoaks di dunia maya. Menurutnya, keberadaan tim ini bisa membantu masyarakat di Jawa Barat khususnya untuk mencari kebenaran terkait informasi yang beredar di media sosial. Tim Saber Hoax memanfaatkan sebuah perangkat lunak, Hoax Analyzer berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk menganalisis informasi.

“Kita berinisiatif menyampaikan mana yang hoaks mana yang tidak dan melakukan verifikasi aduan masyarakat,” ujar pria yang kerap disapa Emil dalam acara Indonesia Millennial Summit 2019 (19/1).

Tak hanya pemerintah, perlawanan terhadap hoaks juga dilakukan masyarakat. Seperti yang dilakukan Masyarakat Anti Fitnah sejak November 2016. Komunitas ini membangun situs *turnbackhoax.id* sebagai rujukan masyarakat dalam mencari fakta dari berita yang beredar.

Situs ini akan menampung berbagai laporan masyarakat tentang informasi hoaks yang beredar melalui beberapa kanal pengaduan. Kemudian, para relawan akan menganalisis informasi hoaks tersebut lewat proses pencarian fakta. Laporan hasil analisis akan diunggah ke situs *turnbackhoax.id* lengkap dengan penjelasannya.

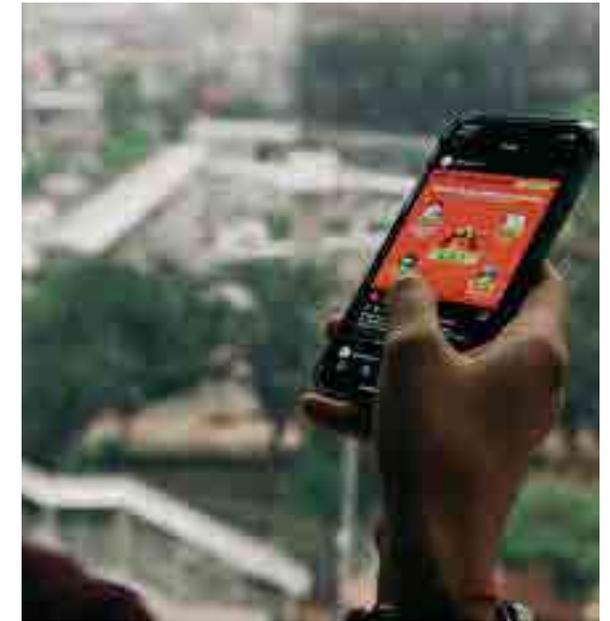
Pakar Information Technology (IT) dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Budi Sutejo juga mengatakan bahwa berita hoaks juga bisa dihindari jika masyarakat memiliki kemampuan literasi yang baik.

Menurutnya dengan memiliki kemampuan literasi yang baik masyarakat tidak akan mudah percaya isu hoaks.

“Kalau literasi pembaca rendah, amat mudah bagi pembaca dibohongi dengan berita hoaks atau informasi yang dibuat seolah-olah benar.”

KPK Selamatkan Rp28,7 Triliun

Sepanjang semester I tahun 2019, KPK telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan di daerah. Jumlah penyelamatan keuangan daerah itu merupakan hasil intervensi KPK terkait penagihan piutang pajak daerah sebesar Rp18,8 triliun, penyelamatan aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga sebesar Rp6,8 triliun, optimalisasi pajak daerah sebesar Rp2,2 triliun, dan penghapusan pembebasan cukai rokok pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sebesar Rp900 miliar.



KPK-PP Muhammadiyah Kompak Cegah Rasuah



KPK dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mewujudkan komitmen membangun budaya anti-korupsi pada semua jenjang pendidikan yang diselenggarakan Muhammadiyah. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 18 Juli 2019 di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Yogyakarta.

MELATIH BUAH HATI BERSIKAP JUJUR

“Dongeng adalah medium terindah dalam tradisi lisan nusantara.”
Pramoedya Ananta Noer

Berbahagiaalah, bila anda masih menjadikan kegiatan mendongeng tiap malam sebelum si kecil tidur sebagai tradisi. Dengan begitu, nilai-nilai kebaikan dari kisah-kisah yang dibacakan akan tertanam dan bisa diteladani.

Karena itu, KanalKPK TV terus memproduksi konten dongeng antikorupsi untuk membentuk karakter mulia pada anak. Seperti yang dilakukan pada suatu pagi yang cerah, di Sekolah Tetum Bunaya, Jagakarsa.

Kedatangan pendongeng Kak Jihad di sekolah itu, mendapat sambutan meriah anak-anak. Mereka segera duduk melingkar dengan rapi dan siap mendengarkan cerita. Kak Jihad mulai bercerita mengenai seorang tukang kayu yang sangat rajin. Saking rajinnya, ayam belum berkokok, dia sudah siap berangkat untuk mencari kayu di hutan.

Setelah lelah seharian bekerja, ia kembali ke rumah. Tiba-tiba, ia kebingungan mencari kapak lusuh dan jelek miliknya yang hilang.

“Ke mana kapakku ya?”

Tiba-tiba dari balik pintu, muncul seorang kakek yang menyodorkan sebuah kapak dari emas dan perak.

“Apakah ini milikmu?”

“Bukan! Kapakku itu kayunya sudah jelek dan besinya sudah lusuh.”

Karena kejujurannya, kakek itu akhirnya menghadiahkan semua kapak miliknya. Si tukang kayu pun sangat bahagia karena memiliki kapak baru yang bagus.

Dalam cerita dongeng lainnya, Kak Ariyo mengisahkan kawanan lebah yang tinggal di pohon yang sangat besar dan tinggi. Di sekelilingnya ada danau dan bun-

ga-bunga. Setiap mendengar kawanan lebah terbang dan mencari madu, beruang madu lantas mengikutinya.

Saat sarang sudah dipenuhi madu, beruang pun mengambil madu itu. Itu dilakukan setiap hari hingga berminggu-minggu. Suatu hari, lebah malas untuk mencari madu. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang akan terjadi ya saat kita malas?

Pesan kejujuran dan kerja keras bila dikemas dalam dongeng, akan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Seperti kata Pram di atas, dongeng adalah medium terindah. Semestinya juga memiliki makna yang indah pula bagi pembentukan karakter anak. 

SIMAK TERUS CERITA-CERITA INSPIRATIF LAINNYA DALAM
KANAL ANAK, SETIAP JUMAT JAM 10 PAGI HANYA DI
KANAL.KPK.GO.ID

KPK Raih *Best Use of Images* GSM Award 2019



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih Government Social Media (GSM) Award 2019 untuk kategori Best Use of Images dalam pengelolaan media sosial oleh lembaga negara. Penghargaan tersebut diserahkan oleh CEO Awrago, Karina Kusumawardani di Perpustakaan Nasional, Selasa (24/9).

KPK Dorong Penguatan *Beneficial Ownership* di Indonesia



Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) pada 3 Juli 2019 di Jakarta. Ada enam kementerian yang ikut menandatangani nota kesepahaman ini, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertambangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

SILEK LANYAH

RENDAH HATI DI ATAS LUMPUR

SILAT YANG DIPANDANG SEBAGAI ILMU BELA DIRI, PUNYA MAKNA YANG JAUH MELAMPAUINYA. BERMAKNA SOSIAL, JUGA AGAMA. SEHINGGA PESILAT ITU MEMILIKI HUBUNGAN YANG BAIK SEBAGAI MANUSIA, JUGA HAMBAA.



Atraksi - Pemuda Desa Kubu Gadang mempertunjukkan atraksi Silok Lanyah, di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

Dua pendekar berada pada dua sudut yang berseberangan di sebuah petak sawah yang berlumpur. Mereka memasang kuda-kuda dan saling memperlihatkan jurus andalan. Setelah alunan gendang tasa, gendang tambua dan sarunai berirama semakin cepat, keduanya berlari dan

saling menyerang.

Mereka saling berupaya menjatuhkan lawan, dengan sapuan kaki, bantingan atau memiting. Karena penuh lumpur dan kubangan air, mereka harus ekstra hati-hati dalam menjaga keseimbangan, dengan kuda-kuda kaki yang kokoh. Serangan dan pertahanan,



1. **Arahan** - Guru di Perguruan Silek Gunung, Nuzirwan Datuk Mulieh, memberikan arahan kepada murid didiknya sebelum pertunjukan Silek dimulai.
2. **Persiapan** - Salah satu murid Perguruan Silek Gunung melakukan persiapan sebelum pertunjukan.

terlihat sama sulitnya di tengah medan yang licin. Pada bagian akhir, salah satu pendekar mengeluarkan pisau, namun serangan itu bisa dipatahkan.

Itulah atraksi silek lanyah yang bisa disaksikan di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat. Dalam Bahasa Minang, silek berarti silat dan lanyah berarti tempat yang berlumpur atau licin, itu sebab atraksi silat ini dimainkan di areal persawahan yang berlumpur.

Atraksi silek lanyah yang diadaptasi dari salah satu silat asli Minangkabau, yaitu silek tuo gunuang yang berasal dari Nagari Gunung. Ia dikembangkan sebagai kesenian dan permainan rakyat, yang kemudian menjadi sebuah atraksi menarik, namun tetap sarat makna dan filosofi kehidupan.

Silek lanyah adalah permainan silat yang atraktif dilakukan di dalam

sawah berlumpur. Ia memiliki aturan yang sama seperti aktivitas silek di Minangkabau pada umumnya. Sehingga apapun aliran dan jenis silek-nya, sebetulnya bisa digunakan pada atraksi silek lanyah yang lebih menarik bila diiringi musik tradisional minang.

Silek Lanyah kemudian lahir dengan ruhnya sendiri. Ia menjadi “tradisi baru” sebagai sebuah pemikiran bahwa kesenian tradisi harus dicipta, digagas sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang berkembang.

Silek lanyah yang digagas seorang penggiat budaya Sumatera Barat, Mevi Rosdian pada tahun 2015, mengatakan, lahirnya atraksi ini terinspirasi dari aspek kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Sebagai masyarakat agraris, kepemilikan sawah menjadi penting. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat sering melakukan aktivi-

tas budaya di areal persawahan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah, terutama ketika mendapatkan hasil panen yang melimpah.

Aktivitas budaya, masyarakat agraris, sawah dan silat, merupakan konfigurasi yang kemudian melahirkan kembali bentuk silek lanyah sebagai atraksi dan kesenian masyarakat Minang.

Menurut salah satu guru di Perguruan Silek Gunung, Nuzirwan Datuk Mulieh, silek lanyah menggambarkan makna kegembiraan dan bersyukur atas nikmat dari Tuhan yang Mahakuasa. Sebab, bagi masyarakat Minang pada umumnya, jelas Nuzirwan, silat bukan sekadar ilmu bela diri, melainkan memiliki filosofi sebagai kehidupan sosiologis itu sendiri. Ada masyarakat, ada aturan, tata karma, serta tata cara bermasyarakat, sehingga kerukunan, persaudaraan dan silaturahmi bisa di-

jaga.

Karena itu, sebagai salah satu perayaan masyarakat agraris, Nuzirwan menceritakan, bila masyarakat akan melakukan sejumlah kegiatan budaya sebagai tanda syukur dengan berlatih silat se usai panen.

“Namanya kehidupan, selalu ada suka dan duka yang kita tempuh, kita jalan terus dengan harapan diberi keberkahan, misal panen yang bagus, kalau kita sekolah agar segera diberi gelar sarjana, kalau berniaga dapat untung yang besar,” kata guru yang memiliki 50-an murid silat ini.

Selain itu, silek juga memiliki makna religius yang kuat dalam masyarakat Minang. Ia juga dipengaruhi ruh keimanan, kesabaran dan ketakwaan yang harus ditegakkan. Hal ini, tentu saja merupakan sari pati dari hubungan adat dan kemasyarakatan dengan agama sebagaimana ungkapan yang terkenal, “Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang bermakna adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Al-Quran.

“Maka kalau ada seseorang yang silek-nya kurang baik, maka yang harus diperiksa bagaimana shalatnya, bagaimana tajwid mengajinya?”

Nuzirwan mengingatkan karena silat berdimensi sosial dan religius, maka setiap orang yang belajar bela diri ini tak boleh bersikap sombong dan lupa diri. Yang terpenting, ia mengingatkan para pesilat, agar memiliki sifat peduli pada sesama, termasuk keluarga dan masyarakatnya.

“Sebelum dia belajar niatnya untuk apa? Untuk membunuh, bertengkar atau menjaga diri?” katanya.

Meski silek lanyah hanya bagian kecil dari tradisi baru yang tercipta, namun para pesilat tetap dituntut memiliki sikap rendah hati dan bertanggung jawab dalam kehidupannya termasuk ketika beratraksi di atas lumpur sekaliipun. ⁶

SISIR TANAH

MENYERAP SARIPATI KEHIDUPAN



S elama sepuluh hari, Bagus Dwi Danto atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Sisir Tanah, hidup bersama masyarakat adat di pinggir Sungai Utik, di Kalimantan Barat. Danto adalah satu dari beberapa seniman yang sedang berkolaborasi dalam sebuah proyek seni antara Indonesia dan Brazil.

Setiap hari, Danto tinggal di rumah kepala desa yang memiliki 28 pintu. Ia mempelajari kehidupan masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dengan alam dengan menjalani rutinitas masyarakat setempat, seperti berladang.

Selama di sana, Danto merasa banyak hal yang perlu diteladani dari perilaku dan prinsip kehidupan yang dianut masyarakat itu, yakni tentang sari pati kehidupan; sikap hidup sederhana dan upaya menjaga keseimbangan dengan alam.

Mereka, menurut Danto, memiliki banyak aturan yang harus dijalani setiap orang, salah satunya mengambil sesuatu dari alam sesuai dengan kebutuhan. Prinsip lingkungan seperti itu dapat menjauhkan kita dari sifat serakah.

“Jadi tidak langsung lantas diambil semua.”

Menurut Danto, prinsip kehidupan seperti itu patut diteladani setiap masyarakat Indonesia agar menjauhkan kita dari perilaku korupsi.

“Karena perilaku korupsi itu dimulai dari sifat serakah,” ujar pria kelahiran Semarang, 28 Oktober 1978 itu.

Pemikiran dan pengalaman se-

lama tinggal di pinggir Sungai Utik, ia tumpahkan ke sebuah buku catatan harian. Dari catatan itu, kemudian ia rangkum menjadi sebuah lirik lagu dengan judul Mantra Penjaga Hutan. Lagu itu berpesan tentang hutan yang menjadi rumah bagi ribuan satwa. Tentang hutan yang Danto sebut sebagai “penjaga masa depan”. Hutan yang menjadi penopang hidup manusia dengan segala sumber daya alamnya.

Mantra penjaga hutan dalam lagu itu ialah doa, dan segala upaya masyarakat yang menjaga hutan dari oknum penghancur hutan seperti penambang pohon, pelaku pembalakan liar, hingga koruptor pemberi izin hasil suap. Dalam lagunya, Danto menyebut para penghancur hutan dengan “bangsa penambang pohon”. Mereka adalah pembawa teror dengan segala mesin industrinya.

Lagu itu mengimbau agar setiap manusia bisa hidup dengan sederhana. Ia bahkan menyematkan sebuah kalimat yang ia peroleh dari Ape Janggut, tetua adat di Sungai Utik. Kalimat itu begitu sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam.

“Untuk apa kita memiliki segalanya, hidup hanya sebentar. Ambil secukupnya, sisakan untuk yang lain.”

Beberapa bulan setelah kepulangannya dari Sungai Utik, Danto merilis lagu tersebut di sebuah pameran seni bersama dengan para seniman lain yang ikut terlibat dalam proyek seni kolaborasi antara Indonesia dan Brazil itu. 



Oleh **Irwan Rinaldi**
Praktisi Parenting

PERAN AYAH MENGUATKAN KEPRIBADIAN ANAK

Salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi adalah persoalan pada karakter. Apa yang seseorang lakukan sekarang, sejatinya telah dipengaruhi nilai diri di masa lampau yang terbentuk ketika usia 0-15 tahun. Sehingga, pembentukan karakter antikorupsi, juga menjadi isu penting dalam dunia pengasuhan.

Hal ini lantas menempatkan keluarga sebagai pihak pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Ayah dan ibu harus bekerja sama dalam menerapkan pola asuh yang baik. Utamanya peran ayah dalam pengasuhan, yang kerap dipandang hanya sebagai pencari nafkah. Padahal tidak, kehadiran ayah sangat dibutuhkan dalam perkembangan kepribadian anak.

Untuk itu, dibutuhkan peran ayah dengan porsi yang lebih besar. Mari saya tunjukkan sebuah pengalaman yang mencengangkan, mengenai pentingnya peran ayah dalam membentuk karakter anak agar ia mampu menghadapi godaan dan tantangan kehidupan.

Beberapa waktu yang lalu, saya membantu Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam meneliti perilaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan

terlarang (narkoba). Saya mencari tahu, bagaimana remaja direkrut menjadi kurir narkoba?

Caranya, melalui hubungan unik yang dibangun. Si bandar membentuk relasi dengan para kurirnya, layaknya ayah dan anak di mana ada cinta, perhatian, tatapan yang menyejukkan dan sentuhan yang membuat si kurir merasa nyaman. Saya pernah mengamati, saat keduanya bertemu untuk transaksi –di mana si bandar memberikan tugas pengiriman kepada si kurir- bandar itu duduk berhadapan, meski ada kursi di sebelah si anak. Dengan menatap matanya, dia menanyakan perasaan si anak, “Kamu bahagia nggak kayak gini (menjadi kurir)?”

Lalu anak itu menjawab, “Saya bahagia kok, Om.”

Ketika bandar dan kurir ini ditangkap, saya tanyakan kepada anak itu, mengapa ia bahagia jadi kurir narkoba? “Ayah saya saja tidak pernah menanyakan perasaan saya.”

Lihatlah, bagaimana cara berkomunikasi si bandar yang menumbuhkan kerelaan, sehingga si anak melakukan pekerjaan haram itu secara sadar dan suka cita. Contoh lainnya, kita bisa me-

lihat faktor penyebab penyimpangan seksual pada anak. Penyimpangan ini bisa terbentuk pada anak usia 8-14 tahun, ketika peran seorang ayah absen.

Dari dua kasus di atas, kita lihat bagaimana penyimpangan terjadi: absennya peran ayah dalam diri anak. Ayah mungkin ada secara biologis, tapi ia tiada secara psikologis.

Nah, korupsi juga merupakan salah satu di antara perbuatan yang menyimpang, di mana kejujuran dan integritas menjadi tak bernilai lagi. Untuk itu, karakter anak perlu diperkuat dengan mengoptimalkan peran ayah dalam pendidikan anak, yakni dengan *loving*, *coaching* dan *modelling*.

Pertama, *loving* adalah mencintai anak dengan setulus hati, yang secara paralel juga dilakukan terhadap istri sebagai penutup ‘hutang’ pengasuhan anak selama ayah tidak ada. Jadi rasa cinta harus dibangun di antara anggota keluarga.

Dari cara bandar narkoba itu bersikap, saya menyimpulkan bahwa cinta itu harus berkualitas meski waktunya terbatas. Karena setiap anak memiliki tangki cinta (*tank of love*) dengan ukuran yang berbeda-beda. Semakin kecil usia anak, semakin kecil juga tangki cintanya. Sebaliknya, semakin besar usia anak, semakin besar juga tangkinya. Jadi kita harus memperhatikan kualitas dan kuantitas cinta dalam setiap pertemuan dengan buah hati kita.

Kedua, *coaching* yaitu cara ayah mengajarkan keterampilan bersikap dan bertingkah laku kepada anak. Kepada anak lelaki, ayah harus mengajari bagaimana seorang laki-laki bersikap, berpikir, mengungkapkan ekspresi dan mengelola emosinya. Anak laki-laki itu akan meng-*copy paste* cara ayahnya bersikap, bagaimana cara ayahnya takut, khawatir, bahagia, dan gembira, juga bagaimana sang ayah menyelesaikan masalah. Ayah juga perlu mengajarkan pada anak perempuan, khususnya di

usia 8-14 tahun. Ayah harus menunjukkan cara seorang laki-laki memperlakukan perempuan dengan baik. Misalnya, memberikan pujian ayah kepada anak perempuan, sekurang-kurangnya empat kali.

Ketika anak laki-laki dan perempuan tidak mempunyai sosok ayah yang menunjukkan hal tersebut, anak akan cenderung mudah berbuat menyimpang.

Ketiga, *modelling* adalah menghadirkan keteladanan bagi anak-anak. Ayah harus menjadi panutan, terutama pada anak usia 0-7 tahun. Dan untuk itu, ayah membutuhkan komitmen dan konsistensi yang baik. Memberikan panutan ini, bisa dilakukan secara langsung, maupun melalui perantara ibu. Hal ini biasanya terjadi, ketika seorang ayah sibuk bekerja dan hanya punya sedikit waktu bersama anak. Anak, tetap memerlukan gambaran tentang sang ayah. Jadi, ketika sang ayah tidak ada di rumah, ibu bisa menghadirkan imajinasi tentang sosok dan peran ayahnya kepada anak. Contoh, ketika anak memuji masakan ibu yang enak, ibu bisa menghadirkan imajinasi peran ayah, bahwa “Makanan enak yang kita nikmati, karena kerja keras sang ayah.”

Cara ini akan masuk ke alam pikiran anak pada usia 7-14 tahun, di mana peran ayah digambarkan dengan simbol tertentu, seperti kerja keras, rajin, kuat, dan pantang menyerah. Karena itu, ayah harus tampil menjadi contoh bagi anak-anak di usia itu, untuk menamakan simbol keteladanan itu.

Kalau semua peran itu sudah dilakukan, ada satu hal yang tak boleh diabaikan dalam pengasuhan ayah, yakni menjaga hubungan seorang ayah kepada sang Khaliq. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tak boleh diabaikan seorang ayah. Dialah sosok yang menjaga agama diri dan keluarganya, sehingga sebuah keluarga tetap berada di jalan yang benar. ❶

Balada Sebuah Rompi

DI NEGERI INI, KORUPTOR MASIH BISA BERGAYA TRENDI. DIFOTO, JUSTRU MENEBAR SENYUM SANA-SINI. PERLU SEBUAH UPAYA, AGAR MEREKA MENYADARI. KORUPSI ITU PERILAKU BUSUK, BUKAN SEBUAH PRESTASI. STIGMA ITU, DIMULAI DARI ROMPI.

Jaket putih berlogo KPK itu dipadukan dengan ikat pinggang besar berwarna hitam. Pada bagian bawah, ia mengenakan rok berwarna hitam-putih bermotif batik lengkap dengan sepatu hak tinggi yang berwarna hitam mengilap.

Penampilan Miranda Goeltom, terdakwa kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS) BI, menarik perhatian media kala itu. Meskipun jaket itu dibordir dengan tulisan “Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi”, ia malah tetap terlihat modis. Padahal kebijakan agar tahanan KPK mengenakan jaket itu bertujuan agar mereka memiliki ciri khusus dan memberikan efek malu atas perbuatannya.

Menurut Ketua KPK saat itu, Abraham Samad, sejak dirilis pada 13 Juli 2012, jaket putih itu justru mendapat banyak kritik dari berbagai pihak yang meminta warna jaket itu diubah, mulai dari politisi hingga pelajar sekolah dasar.

“Warna putih dianggap tidak menimbulkan efek jera dan tidak mem-



Tahanan - Rompi Oranye yang saat ini digunakan tahanan di KPK

buat malu sama sekali. Banyak surat masuk ke KPK minta warna tersebut diganti.”

Lima tahun sebelum KPK menggunakan jaket putih, Koalisi Masyarakat Sipil pernah mengusulkan beberapa contoh pakaian tahanan KPK pada 12 Agustus 2008. Saat itu, para aktivis antikorupsi itu melakukan ‘peragaan

busana’ dari area parkir Gedung KPK menuju ruang konferensi pers. Ketiga model mengenakan pakaian terusan berlengan dan beralas panjang lengkap dengan rantai hitam dan pemberat yang melingkar di kakinya. Persis seperti narapidana di buku cerita.

Satu aktivis menggunakan baju berwarna oranye. Baju itu ia ‘sulap’ dari baju petugas kebersihan. Aktivis lain

Warna putih dianggap tidak menimbulkan efek jera dan tidak membuat malu sama sekali.

Abraham Samad

tahanan KPK pada pertengahan 2013. Pimpinan KPK menugaskan Kepala Bagian Rumah Tangga, Harry Hidayati untuk membuat desain rompi tahanan baru, berbekal rekomendasi dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Harry lantas mendesain beberapa baju dengan berbagai pilihan warna seperti hijau, loreng-loreng, dan oranye. Akhirnya, Pimpinan KPK memilih warna oranye sebagai warna baru bagi seragam tahanan KPK.

“Kami memilih warna oranye agar ketahuan, mereka adalah tahanan KPK. Kalau kabur, warna oranye ini mudah dikenali dan terang,” ujar Pimpinan KPK saat itu, Bambang Widjojanto.

Kemudian, rompi oranye itu diberi aksan satu garis hitam. Belakangan, muncul sebuah pendapat bahwa rompi tersebut harus memiliki tiga garis hitam, dan keputusan itu pun disetujui.

“Waktu itu kita sepakat kalau garis hitam di rompi tahanan harus tiga, untuk menandakan bahwa korupsi itu benar-benar kejahatan luar biasa,” kata Bambang.

Setelah disetujui, Harry pergi ke pasar Tanah Abang untuk membeli bahan baju. Ia mengeksekusi sendiri, membuat pola rompi, dan menjahitnya.

‘Seragam baru’ koruptor itu kemudian dirilis pada 24 Mei 2013 saat kegiatan lokakarya media di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah dirilis, penggunaan rompi itu langsung diterapkan. Tersangka kasus korupsi impor daging Luthfi Hasan Ishaq saat itu, menjadi orang pertama yang mengenakan rompi oranye tersebut saat diperiksa pada 28 Mei 2013 di Gedung KPK. ◉

menggunakan baju berwarna merah, yang dimodifikasi dari seragam seorang montir. Aktivis terakhir, menggunakan baju praktik siswa SMK berwarna hitam sebagai baju tahanan. Pada bagian belakang ketiga baju tersebut, tertulis “Tahanan KPK”.

Setelah fenomena jaket modis tahanan KPK mencuat, KPK memikirkan ulang untuk mendesain lagi baju

KEPUTUSAN PEPEN

Oleh: Jati Setya

Pepen berjalan lesu. Pandangannya kosong, tak ubahnya isi perut para gelandangan ibu kota. Lalu-lalang mobil, motor, dan kendaraan motor lainnya, ia abaikan. Mata dan pikirannya masih merekam jelas percakapan dengan kawan lamanya.

“Murah, Pen! Tujuh puluh lima juta aja nanti langsung kerja. Dijamin!” kalimat itu berdentung terus sepanjang Pepen melangkah.

“Sial!” umpat Pepen dalam hati.

Pepen melambatkan tangan menghentikan laju bus. Ia ingin segera pulang. Menumpahkan beban pikiran di kasur kamarnya. Hari ini hari yang berat bagi Pepen, juga hari-hari sebelumnya. Hari yang sama. Hari penolakan kerja. Dramatis benar jalan hidup Pepen. Lulusan anyar yang penuh idealisme, *cumlaude*, namun harus terbentur dengan idealismenya sendiri.

Sobri, kakak kelas Pepen sewaktu SMA dulu, kini menjadi sosok yang paling sering menghuni ruang pikirannya. Mereka bertemu persis sepekan setelah Pepen wisuda. Saat itu Pepen sedang berada di rumah sakit guna mengurus kelengkapan syarat administrasi pendaftaran kerja. Sobri ada di sana, bekerja di sana lebih tepatnya. Ia menjadi kepala salah satu subdit fungsional di rumah sakit itu. Nostalgia mereka ber-

lanjut saat jam makan siang.

“Dulu pas lulusan, pakdeku punya kenalan orang dalam di sini, Pen. Dulu sih masih murah. Sekitar lima puluh jutalah. Alhamdulillah nggak pake ribet langsung masuk dan orientasi kerja. Sekarang malah udah dapat jabatan,” tutur Sobri penuh bangga sambil nyeruput es teh pesanannya.

“Lima puluh juta? Tidak!” batin Pepen. Ia tak menimpalnya. Ia memilih ikut nyeruput es teh dan melanjutkan makan siangnya. Warung makan semi modern tempat mereka bercakap kian ramai.

Setahun berlalu. Pepen tak menyangka bahwa pertemuan mereka kala itu, mampu menggoda keimanannya. Idealismenya tak lagi sekokoh dulu yang perlahan terkikis oleh pahitnya realitas hidup. Dulu obrolan itu tak lebih dari sekadar basa-basi belaka. Bahkan lepas pertemuan itu, tak ada obrolan lebih lanjut. Sama sekali. Pepen sibuk dengan idealismenya, berjibaku dengan satu lowongan kerja ke lowongan kerja lainnya. Sobri tak sempat mampir dalam pikirannya. Namun sepertinya, sekarang hal itu sudah berubah.

Pepen menarik napas panjang. “Tujuh puluh lima juta akan mengakhiri semua ini, Pen!” batin Pepen bersuara.

“Kau tak akan lagi pulang menanggung kecewa! Kau tak akan lagi berharap pada para *interviewer* bermuka palsu itu! Kau akan menghasilkan uang bulanan! Kau bisa memberikan uang kepada kedua orangtuamu, adik-adikmu! Memangnyu kau tak pernah berpikir betapa tersiksa dan malunya orangtuamu melihat anaknya, lulusan *cumlaude* universitas bergengsi, tapi hanya bisa nganggur? Tak tahu kau mereka terus bersabar menahan omongan miring tetangga dan keluarga lainnya, hah? Coba kau pikirkan itu, Pen! Sawah bapakmu toh ada dua, jika dijual satu tentu tak jadi soal! Sudah setahun kau jadi pengangguran! Ingat itu Pen!” luapan-luapan emosi membanjiri batinnya.

Keinginan Pepen sederhana saja sebenarnya, mengenakan setelan kantor yang rapi, memakai dasi, wangi, punya ruang kerja, punya berkas-berkas yang harus diselesaikan. Pepen ingin juga seperti yang lain, menjabat pegawai resmi dan menerima gaji tiap bulan. Pergi pagi hari, pulang sore, kadang lembur. Pepen ingin itu. Keinginannya tak muluk-muluk, hanya ingin bekerja. Namun sayangnya, hingga kini semesta tak kunjung merestuinnya.

Pepen mengusap muka dengan kedua tangannya. Batinnya rapuh. Ia ingin mengakhiri semua ketidakpastian ini. Bus melaju mendekati perempatan Bendo, pemberhentian terdekat dari rumah Pepen. Tak berselang lama, sampailah Pepen di pekarangan rumah. Bapak dan ibunya tengah menonton acara dangdut di televisi.

“Pak.. buk..” akhirnya Pepen memulai juga. Suaranya terdengar lirih, nyaris tercekat. Ketegangan menyeruak. Sayang sekali, bapak dan ibunya tak menoleh. Tak mendengar sepertinya. Mereka masih sibuk bergumul dengan acara teve kesayangannya.

“Ealah Gustiii..” keluh batin Pepen. Ia memilih mundur ke kamarnya, kem-

bali merenungi nasibnya yang makin tak karuan. Pikiran Pepen kini terlampau penuh, bercabang ke mana-mana, kacau, dan hampir meledak.

Tenangkan pikiranmu, Pen!” bisik hati Pepen memberi nasihat. Ia kembali menghela napas. Kini ia berusaha memejamkan mata. Pepen ingin tidur.

“Peeeen! Pepeen! Makan dulu, le!” seru ibu Pepen dari luar kamar.

Sayup-sayup suara ibu memaksanya membuka mata. Ia mengecek jam. Oh, rupanya sudah dua jam ia tertidur. Lumayan. Pepen berusaha mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. Di luar tampak ibu, bapak, dan kedua adiknya duduk melingkar di tikar depan teve. Mereka siap bersantap dengan sayur gori nget-ngetan -Sayur angka yang sudah dipanasi berulang kali- sambal terasi, dan tempe garit. Sungguh sebuah kesederhanaan yang hakiki. Pepen bergabung.

“Ini le, piringmu. Nasinya ambil yang banyak.” ujar ibu Pepen sembari mengulurkan sebuah piring gembeng kepadanya.

“Iya le, yang banyak! Adik-adikmu pada nggak mau makan banyak je. Lagi diet katanya! Hahaha!” bapak menimpali sembari terbatak.

“Kelakuan ABG zaman sekarang!” timpal ibu Pepen sembari tersenyum melirik kedua anak gadisnya. Adik Pepen hanya cengar-cengir mesem.

Di tengah-tengah keriangannya mereka menikmati hidangan sederhana, Pepen membuka suara, “Pak.. buk..” Pepen menjeda ucapannya. “Besok subuh kalau mau berangkat kerja, bangunin Pepen ya!”

Bapak dan ibu Pepen kompak mengangguk. Mereka berdua saling beradu pandang.

Pepen meneruskan, “Mulai besok, Pepen mau bantu bapak dan ibuk kerja..”

“Nggarap sawah!” imbuhnya. 



MENGAPA KITA TEPERDAYA?

#BLESSED
Sutradara :
 Candra Aditya
Produser :
 KPK & Carnival Films
Produser :
 Angga Buana
Tahun Edar :
 2018
Pemain :
 Agnes Naomi, Mariana Sesli, Betet
 Kunamsinam, Bude Sumiyati, Mita Hapsari, dll

Karena akan berlibur keliling Eropa, Tante Amira membujuk Della agar menetap di rumahnya selama sebulan. Gadis cantik itu pun setuju menjaga rumah mewah sang tante.

Rumah yang begitu besar dengan segala fasilitas dan perabotan mewah, membuat Della tak berhenti memperbaiki status di media sosial dengan tanda pagar (#) blessed. Dari konten-konten itu, Della mencitrakan dirinya sebagai orang yang diberkahi dengan harta yang berlimpah sebagai simbol kesuksesan. Ia kerap mengaku mendapatkan itu semua berkat investasi.

Dari kebohongan satu, lahirlah kebohongan demi kebohongan agar ia dianggap sukses oleh teman-temannya.

Suatu hari, Rina, teman Della saat kuliah dulu, menulis status di media sosial kalau ia kebingungan mencari tempat untuk arisan. Kemudian, Della menelepon Rina untuk menawarkan 'rumahnya' sebagai tempat arisan. Ia pun setuju.

Rina dan semua temannya kagum dengan kesuksesan Della yang masih muda dan belum berkeluarga. Mereka penasaran

dari mana asal mula kesuksesan Della, yang berbuntut pada tawaran investasi yang selama ini dijalani Della.

Singkat cerita, banyak orang yang terbujuk dan ikut investasi yang dijanjikan Della dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Dengan bantuan Rina, Della pun semakin banyak menjaring calon investor.

Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah kebohongan Della? Akankah ia berhasil menjaring lebih banyak ibu-ibu untuk berinvestasi?

Film ini merupakan salah satu karya dari finalis Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2018. Film berdurasi 19 menit ini menyisakan pesan, bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Dibutuhkan lebih dari sekadar kerja keras, untuk bisa meraihnya.

Ia juga menggambarkan kehidupan media sosial yang maya, sangat mempengaruhi dunia nyata kita. Kebanyakan kita, kerap tertipu dari kesan yang diciptakan orang lain di media sosial demi menjaga konten agar tetap menarik. 📌

JALAN BERLIKU MELAWAN KORUPSI

Perjuangan melawan korupsi, sejatinya telah dilakukan sejak negara ini baru berdiri. Perjuangan itu mengerucut pada gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga antikorupsi independen yang melalui proses perdebatan yang panjang dan melelahkan.

Siapa sangka kalau gagasan itu justru lahir dari obrolan pinggir jalan para pegiat antikorupsi tahun 1998? Perjalanan panjang yang dimulai dari obrolan sekumpulan anak muda yang kemudian berlanjut ke ruang-ruang diskusi formal hingga melibatkan para profesional seperti Mari'e Muhammad, Erry Riyana Hardjapamekas, Arief T. Surowidjojo, Chandra M. Hamzah, Sudirman Said, Kemal Azis Stamboel, dan Ahmad Fikri Assegaf.

Buku ini menceritakan bagaimana langkah awal para pembawa cita-cita reformasi, membentuk sebuah organisasi dengan nama Masyarakat Transparansi Indonesia yang dipimpin oleh Mari'e Muhammad. Mereka menggulirkan wacana perubahan sistem dan pembentukan Badan Independen Antikorupsi (BIAK).

Wacana itu mereka bawa ke berbagai pihak, mulai dari parlemen, politikus, pengusaha, hingga Presiden BJ Habibie kala itu. Berbagai perdebatan turut dijumpai dalam perjalanannya, termasuk dalam merumuskan konsep badan antikorupsi yang independen.

Hingga akhirnya perjalanan panjang yang melelahkan ini melahirkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua Undang-undang itu menjadi tanda dimulainya Indonesia yang lebih baik. Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di penghujung tahun 2003 itu menjadi awal perubahan Indonesia dalam



penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Buku Berdiri Untuk Negeri ini digagas oleh para pegiat antikorupsi tahun 1998; Ahmad Fikri Assegaf, Arief T. Surowidjojo, Chandra M. Hamzah, Erry Riyana Hardjapamekas, Kemal Azis Stamboel, dan Sudirman Said.

Kepingan kisah perjuangan mereka berhasil disusun dengan apik berkat kerja keras tiga penulis perempuan, yakni Arin Swandari, Cisia Satwika, dan Lilyani Harsulistiyati. Para penulis menyajikan cerita dan pemikiran para tokoh lengkap dengan berbagai dokumen pendukung yang membuat pembaca bisa melacak pemikiran pejuang antikorupsi secara utuh. 📌

Penulis :
ARIN SWANDARI, CISIA SATWIKA, DAN LILYANI HARSULISTYATI
 Penerbit :
PENERBIT BUKU KOMPAS
 Kolasi :
278 HLM.
 Bahasa :
INDONESIA
 Judul Buku :
KPK BERDIRI UNTUK NEGERI

DALAM KORUPSI, JARINGAN SUAP SALING MENGUNCI



Arifin Lambaga

Mantan Ketua Komite Teknik Sistem Manajemen Anti Penyuapan –
Badan Standardisasi Nasional International Indonesia

Dalam pencegahan korupsi saya mengusulkan sebuah perspektif baru bahwa korupsi adalah sebuah ekosistem. Ini adalah analogi biologis alam semesta. Di alam semesta, sebuah tatanan dapat terselenggara berkesinambungan, akibat adanya fungsi-fungsi spesifik makhluk hidup dan lingkungan yang menopangnya.

Sistem pemerintahan sebagai sub-sistem sosial, analog dengan keadaan itu. Pemerintah beserta aparturnya menetapkan regulasi, agar unsur ekosistem lainnya berjalan optimal. Produsen menyediakan barang dan jasa konsumsi.

Seluruhnya akan berjalan sirkular dinamis, manakala fungsi-fungsi dijalani dengan patuh. Tak satu unsur pun di negara menerabas fungsi unsur lainnya. Korupsi dalam perspektif ini terjadi akibat tak dipatuhinya fungsi-fungsi yang telah disepakati. Misalnya, pemerintah turut memainkan fungsi produksi, produsen turut menyusun regulasi, atau konsumen yang berupaya

Dalam praktiknya, permainan penyalahgunaan wewenang, tak bisa dilakukan satu pihak. Ada tuntutan melibatkan pihak lain sebagai bagian jejaring: saling mendukung, kemudian saling mengunci. Antoni (2013) melalui disertasi doktoralnya “Hubungan Saling Mengunci Sebagai Bentuk Komunikasi Korupsi”, memperlihatkan

adanya bentuk kedekatan ini. Dan untuk mempertahankan “keamanan” pihak-pihak yang terlibat, terjadi mekanisme saling mengunci, *interlocking directorate*. Ini dilakukan sebagai proteksi ketika ada pihak yang dikhawatirkan melanggar kesepakatan. Implikasinya, terjalin relasi yang mengaburkan peran khas masing-masing pihak dalam ekosistem.

Lebih lanjut Antoni, menyebutkan sejumlah latar belakang hubungan kedekatan yang bersifat informal jadi dasar terbentuknya jaringan komunikasi *interlocking directorate* di mana telah memuluskan berlangsungnya praktek-praktek korupsi. Sejumlah latar belakang kedekatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hubungan keluarga, pertemanan, dan hubungan pekerjaan sebelumnya.

Dalam perspektif lain, sebagaimana ungkapan antropolog, perilaku memberi hadiah, adalah budaya Indonesia yang telah mengakar lama. Dan ternyata, ini bukan hanya khas Indonesia. Bangsa-bangsa Asia lain juga suka mempertukarkan hadiah.

Terdapat dua makna pemberian hadiah. Pertama, sebagai ungkapan turut berbahagia pemberi hadiah atas pencapaian prestasi, kebahagiaan maupun berkah, yang dialami pihak lain. Yang kedua, hadiah dimaknai sebagai ungkapan terima kasih, atas peran yang telah dijalankan pihak lain. Implikasi makna kedua dari hadiah, mereka

yang tak memberi hadiah dianggap tak tahu berterima kasih. Dan sanksi etis bagi yang tak tahu berterima kasih, dapat dianggap “tak berbudaya”.

Dalam konteks suap dan korupsi, budaya berterima kasih makin sering dirupakan dalam pemberian hadiah. Momennya sering sengaja ditukar, memberi hadiah sebagai ungkapan turut bersyukur, namun fungsinya sebagai ungkapan terima kasih. Praktiknya, seseorang yang telah diuntungkan pihak lain secara tidak sah, menyampaikan rasa terima kasihnya dalam bentuk hadiah, misalnya pada *event* syukuran yang dijalani pihak lain.

Jika dua perspektif di atas dikaitkan, sangat rasional dalam praktik kenegaraan terdapat pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri, dengan cara memanfaatkan regulator. Pihak ini menghendaki dilonggarkannya fungsi mengatur dan menegakkan aturan. Agar regulator bersedia mengabaikan pelanggaran, suap diberikan sebagai hadiahnya. Mekanisme *interlocking directorate*, mulai terbentuk.

Produsen maupun konsumen yang menerabas regulasi, melakukannya lewat orang yang telah dikenal, misalnya mantan bawahan, kerabat, sahabat atau orang yang telah diberi jasa di waktu-waktu sebelumnya. Dengan pihak yang telah dikenal, dibangun relasi saling memberi, saling menerima dan saling melindungi. Manakala

terdapat pihak yang terdesak oleh peneakan hukum, mekanisme saling melindungi, berkembang jadi saling mengunci.

“Anda membuka kedok kami, kami buka kedok anda. Maka sebaiknya saling melindungi.” Para pihak pun saling terkunci.

Jika diurai dengan saksama, kata kunci jaringan saling mengunci dalam korupsi diawali suap. Maka ketika suap dapat dicegah pada kesempatan pertama, tercegah pula mekanisme pembentukan jejaring yang kompleks.

Persoalannya sebagaimana uraian sebelumnya, suap sering terbalut sebagai praktik budaya. Suap datang dalam wujud hadiah. Maka dalam memerangi korupsi yang berubah jadi jaringan saling mengunci, dapat dipertimbangkan introduksi budaya baru. Yaitu budaya baru dalam memandang hadiah bahwa tak semua hadiah yang diungkapkan dalam momen bahagia merupakan ungkapan turut bahagia. Sangat boleh jadi itu adalah suap, atas permintaan praktik ilegal yang akan diminta pemberi hadiah di kemudian hari.

Hadiah-hadiah tertentu memiliki tendensi dilonggarkannya fungsi yang telah disepakati dalam ekosistem. Dengan budaya baru ini pula, setiap pihak tidak perlu khawatir dianggap tak berterima kasih, ketika hadiah tidak diberikan atas peran wajib yang telah dijalankan regulator. ●



KH Abdur Rozak Fachruddin

Ketua Umum PP Muhammadiyah 1968-1990

MENGABDI TAK KENAL AMPLOP

IA MEMIMPIN ORGANISASI PP MUHAMMADIYAH CUKUP PANJANG, 22 TAHUN. PENGABDIANNYA, TAK DIUKUR DARI MATERI. HIDUP HANYA DARI UANG PENSUNAN.

Namanya Abdul Razaq Fachruddin atau lebih dikenal dengan panggilan Pak AR. Ia dilahirkan di Cilangkap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta, pada 14 Februari 1916. Anak ketujuh dari pasangan KH Fachruddin dengan Nyai Hajjah Fachruddin binti KH Idris ini menghabiskan masa kanak-kanaknya di Pakualaman.

Pada tahun 1923, A.R. Fachrudin bersekolah formal di Standard School Muhammadiyah Bausasran, Yogyakarta. Pada tahun 1925, ia meninggalkan desanya dan bersekolah di Standard School (Sekolah Dasar) Muhammadiyah Kotagede, Yogyakarta, karena membantu usaha sang ayah yang mengalami kebangkrutan.

Pada tahun 1930, ayah A.R. Fachruddin meninggal di Bleberan dalam usia 72 tahun. Tiga tahun kemudian, A.R. Fachruddin belajar di Madrasah Darul Ulum Muhammadiyah Wanapeti, Sewugalur. Selanjutnya pada tahun 1935 ia melanjutkan sekolahnya ke Madrasah Tabligh-

school (Madrasah Muballighin) Muhammadiyah.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian studinya, AR Fachrudin mulai mengabdikan ilmunya, sehingga ia dikirim oleh pengurus besar Muhammadiyah ke Talangbalai (sekarang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan) dengan tugas mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah pada 1935. Di sana, dia mendirikan Sekolah Wustha Muallimin Muhammadiyah setingkat SMP. Enam tahun kemudian, ia pindah ke Sungai Batang, Palembang sebagai pengajar Hollandcse Inlanders School (HIS) Muhammadiyah yang setingkat dengan SD.

Pada tahun 1944, AR Fachrudin memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta. Di sana, ia aktif berdakwah sambil terus belajar kepada para pendiri generasi pertama pimpinan dan aktivis Muhammadiyah. Keterlibatan di pusat Muhammadiyah membuat ia dipercaya untuk

menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

Karir organisasinya terus menanjak, ia kemudian menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, selanjutnya menjadi anggota Dzawil Qurba Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sampai akhirnya dipercaya memimpin Muhammadiyah pada 1968-1990. Bisa dikatakan, ia merupakan Pimpinan Muhammadiyah dengan masa jabatan terlama, yakni sekitar 22 tahun.

Sepanjang kiprahnya bagi kemasyarakatan umat, ia dikenal sebagai tokoh panutan umat muslim bahkan umat agama lain. Menurut penuturan putranya, yaitu Sukriyanto, AR

Jika beliau terpaksa menerima amplop, setibanya di rumah amplop itu langsung dibagi-bagikan kepada pegawai lain yang lebih membutuhkan

Fachruddin dikenal karena kebaikan akhlak dan keteladanan.

“Pak AR itu berteman dengan siapa saja dan juga bergaul dengan siapapun dan dari agama apapun. Saat berdakwah, siapa saja yang mengundang tidak pernah menanyakan latar belakangnya, beliau akan hadir ke sana,” ungkapnya.

Semasa hidupnya, AR Fachruddin juga dikenal taat beribadah dan selalu merindukan masjid. “Beliau adalah sosok yang taat beribadah, dan setiap hari ayah saya menjalankan ibadah salat ke masjid,” katanya.

Keteguhan sikap dan keteladan-

an pribadinya, juga tampak saat menjalankan tugas berdakwah. Ia punya prinsip, tugas dakwah itu harus dijalankan dengan ikhlas, untuk Allah swt, bukan untuk manusia. “Dakwah harus ikhlas dan tidak boleh menerima amplop,” kata AR Fachruddin.

Ia khawatir, jika mau menerima amplop dapat mempengaruhi niat dakwah itu sendiri. Dan baginya, itu sangat berbahaya bagi seorang dai yang berniat menyebarkan pesan-pesan Allah dengan ikhlas. Itulah sebabnya, meski laris diundang ceramah, AR Fachruddin tetap miskin. Karena ceramahnya tak menghasilkan uang. Hingga akhir hayatnya, ia tidak memiliki rumah dan mobil pribadi.

Beliau hanya hidup dari gaji pensiunan. Jika beliau terpaksa menerima amplop, setibanya di rumah amplop itu langsung dibagi-bagikan kepada pegawai-pegawai lain yang lebih membutuhkan di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Hidup sederhana yang dijalani AR Fachruddin, tak terlepas dari peran istrinya, Siti Qomariyah yang kerap disapa Bu AR. Ia tidak pernah mengeluh dengan penghasilan dan apa pun yang dibawa suaminya ke rumah sebagai nafkah keluarganya. Bahkan ketika Pak AR pulang tak membawa apa pun, Bu AR tetap menyambutnya penuh rasa syukur karena suaminya selamat dalam perjalanan hingga sampai ke rumah.

Bu AR selalu mendukung kegiatan dakwah Pak AR meski tak menghasilkan uang. Bu AR pun mendukung prinsip dakwah yang dilakukan Pak AR yang motivasinya karena Allah semata. ❶

TEMUKAN

Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas

<https://jurnal.kpk.go.id>





LAYANAN
INFORMASI

KPK

Komis Pemberantasan Korupsi



Senin - Jumat

06.00 s.d. 18.00

Lingkup Layanan:

Informasi Gratifikasi, Informasi LHKPN,
Informasi Publik dan Informasi Pengaduan Masyarakat

